

**PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA,
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, UPAH
MINIMUM, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN
TAHUN 2019-2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :

RIFANSYAH BAYU PRATAMA

NIM 40122156

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, TINGKAT
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA, UPAH MINIMUM, INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI EKS KARESIDENAN
PEKALONGAN TAHUN 2019-2025**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

RIFANSYAH BAYU PRATAMA

NIM 40122156

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifansyah Bayu Pratama

NIM : 40122156

Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2025**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2026

Yang Menyatakan,



Rifansyah Bayu Pratama

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Rifansyah Bayu Pratama**

NIM : **40122156**

Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2025**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2026

Pembimbing,



Dr. H. A.M Muh Khafidz Ma'shum, M.ag.

NIP.197806162003121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Kejen Pekalongan. www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Rifansyah Bayu Pratama**
Nim : **40122156**
Judul Skripsi : **Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penyaluran Dana Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2025**

Dosen Pembimbing : **Dr. H. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.ag**

Telah diujikan pada hari Senin 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I


Drajat Stiawan, M.Si.

NIP. 198301182015031001

Penguji II


Indah Purwanti, M.T.

NIP. 198701072019032011

Pekalongan, 26 Oktober 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag.

NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Allah SWT memang tidak menjanjikan hidup akan mudah, tapi dua kali Allah SWT berjanji bahwa *“Fa inna ma ‘al- ‘usri yusra, Inna ma ‘al- ‘usri Yusra”*

(QS. AL-Insyirah 94:5-6)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”

(Tan Malaka)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan”

(Najwa Shihab)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Perjalanan panjang ini tentu tidak mudah, penuh dengan tantangan, air mata, dan rasa lelah. Namun berkat pertolongan-Nya dan dukungan orang-orang terkasih, penulis mampu sampai pada titik ini.

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, yang tak pernah lelah mendoakan, berjuang, dan berkorban. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, nasihat yang menguatkan, serta keringat dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu penulis balas. Setiap langkah yang penulis tempuh berdiri di atas doa dan cinta kalian. Semoga gelar ini menjadi awal untuk membahagiakan Bapak dan Ibu.
2. Kedua adikku tersayang, Bagas dan Zaki yang selalu menjadi penyemangat dan alasan penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas tawa, perhatian, dan dukungan yang sering kali tanpa kalian sadari telah menguatkan penulis di saat lelah. Semoga kalian kelak dapat meraih mimpi yang jauh lebih tinggi dari yang pernah penulis capai.
3. Bapak Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar dan penuh perhatian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini
4. Seseorang yang istimewa bagi penulis dengan nim 40122154, yang selalu menemani penulis di setiap proses penulisan skripsi ini, selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis, dan tak henti memberikan semangat di saat penulis hampir menyerah. Terima kasih telah hadir, percaya, dan tetap tinggal di masa-masa tersulit sekalipun.
5. Teman-teman dekat, yang telah menjadi tempat berbagi tawa, cerita, dan semangat selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga kita semua sukses dan dipertemukan kembali di kesempatan terbaik.

ABSTRAK

Rifansyah Bayu Pratama. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019–2025.

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar pembangunan, termasuk di Eks Karesidenan Pekalongan yang meliputi lima kabupaten dan dua kota di Jawa Tengah. Selama 2019–2025, tingkat kemiskinan di kawasan ini berkisar antara 6,14 hingga 17,43 persen, dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang mencatat angka tertinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia (IPM), dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan, baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Data berupa data panel dengan 49 observasi (tujuh kabupaten/kota selama tujuh tahun) yang ditransformasi ke logaritma natural dan diolah dengan EViews 13. Uji Chow dan uji Hausman menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) adalah model terbaik.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (koefisien 0,220016; probabilitas 0,0003). IPM berpengaruh negatif dan signifikan (koefisien -2,056092; probabilitas 0,0096). Tingkat partisipasi angkatan kerja (probabilitas 0,6778), upah minimum (probabilitas 0,8770), dan penyaluran dana zakat (probabilitas 0,1625) tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, kelima variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (F-hitung 223,2066; probabilitas 0,000000). Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,980740 menunjukkan bahwa kelima variabel menjelaskan 98,07 persen variasi tingkat kemiskinan, sedangkan 1,93 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Kata Kunci: Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Zakat, Tingkat Kemiskinan.

ABSTRACT

Rifansyah Bayu Pratama. *The Effect of Open Unemployment Rate, Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, Human Development Index, and Zakat Distribution on the Poverty Rate in the Former Residency of Pekalongan, 2019–2025.*

Poverty remains a fundamental development challenge, including in the Former Residency of Pekalongan, which comprises five regencies and two cities in Central Java. During 2019–2025, the poverty rate in this region ranged from 6.14 to 17.43 percent, with Brebes and Pemalang Regencies recording the highest figures. This study aims to analyze the effect of the open unemployment rate, labor force participation rate, minimum wage, human development index (HDI), and zakat distribution on the poverty rate, both partially and simultaneously.

This study uses a quantitative approach with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) and the National Board of Zakat (BAZNAS). The data are panel data with 49 observations (seven regencies/cities over seven years), transformed into natural logarithms and processed with EViews 13. The Chow and Hausman tests indicate that the Fixed Effect Model (FEM) is the best model.

The partial test results show that the open unemployment rate has a positive and significant effect on the poverty rate (coefficient 0.220016; probability 0.0003). HDI has a negative and significant effect (coefficient - 2.056092; probability 0.0096). The labor force participation rate (probability 0.6778), minimum wage (probability 0.8770), and zakat distribution (probability 0.1625) have no significant effect. Simultaneously, the five variables significantly affect the poverty rate (F-statistic 223.2066; probability 0.000000). The Adjusted R^2 of 0.980740 indicates that the five variables explain 98.07 percent of the variation in the poverty rate, while the remaining 1.93 percent is explained by factors outside the model.

Keywords: Poverty Rate, Open Unemployment Rate, Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, Human Development Index, Zakat distribution, Poverty rate

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan motivasi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama saya menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas kepemimpinan dan dukungan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa.
3. Dr. Kuat Ismanto, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas kebijakan dan pelayanan akademik yang memudahkan proses penyelesaian studi ini.
4. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas bimbingan dan arahan dalam pengelolaan program studi selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta mengarahkan saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Muhamad Alfian, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA), atas nasihat, motivasi, dan arahan yang senantiasa diberikan sejak awal hingga akhir masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas ilmu yang

telah diajarkan. Semoga ilmu tersebut menjadi amal jariyah dan terus memberi manfaat

8. Kedua orang tua, dan kedua adik saya yang tak pernah lelah mendoakan, menyemangati, dan mencurahkan kasih sayang kepada saya di setiap langkah perjuangan ini.
9. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik dalam penyajian maupun kedalaman isinya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan karya ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2026



Rifansyah Bayu Pratama

40122156

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR GRAFIK	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Landasan teori	17
B. Telaah Pustaka	35
C. Kerangka Berpikir	39
D. Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Pendekatan penelitian.....	46
D. Populasi dan sampel	47
E. Variabel Penelitian	47
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data	50
H. Metode Analisis Data	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Deskripsi Data Penelitian.....	58
B. Deskripsi Objek Penelitian.....	69
C. Analisis Data Panel	72
D. Pembahasan.....	90
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Keterbatasan Penelitian.....	105
C. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	cxvi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian Transliterasi Arab – Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaanya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu di bahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab – Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadist), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf Latin untuk menuliskan bahasanya. Karena Ketiadaan pedoman uang baku yang dapat di pergunakan untuk umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab – Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara Nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah di bahas beberapa makalah yang disajikan oleh para. Ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha kearah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi

Arab – Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari H. Sawabi Ihsan, M.A, Ali Audah, Prof. Gazali Dunai, Prof. Dr. H. B. Jassin, dan Drs. Sudarno, M.Ed.

Dalam pidato pengarahannya Tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pengetahuan Keislaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman Transliterasi Arab–Latin yang baku telah lama di dambakan karena sangat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak Semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, sangat memerlukan pedoman yang baku tentang Transliterasi Arab-Latin yang dapat di jadikan acuan dalam penelitian dan pengalih huruf an, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda beda, Usaha penyeragamannya sudah pernah di coba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat islam di Indonesia. Oleh karena itu dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya pedoman Transliterasi Arab – Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk di gunakan secara Nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman Transliterasi Arab – Latin ini di susun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Di Sempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “ satu fenom satu lambang”.
3. Pedoman Transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab - Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman Transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- ذُكِرَ zukira
- يَذْهَبُ yazhabu
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ا	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtulattfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul-munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا rabbanā
- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- الْحَجَّ al-ḥajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- السَّيِّدُ as-sayyidu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْبَدِيعُ al-badī'u
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna
- أُمِرْتُ umirtu
- أَكَلْ akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْكَافِلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

إِلَيْهِ سَبِيلًا manistaṭā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي Inna

بِبَكَّةَ مُبَارَكًا awwalabaitinwuḍi’alinnāsilallaḥibibakkatamubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ Syahru Ramaḍān al-laḥi unzila fih al-Qur’ānu

الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِإِلَاقٍ الْمُبِينِ Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn

Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَاصِرٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ Naṣrun minallāhi wafathunqarīb

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhabikullisyai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Pekalongan (Persen), 2019-2025	4
Tabel 1. 2 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan Pekalongan (Persen), 2019-2025	5
Tabel 2. 1 Telaah Pustaka	35
Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis	39
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Operasional.....	48
Tabel 4. 1 Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan.....	59
Tabel 4. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan.....	61
Tabel 4. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Eks.....	62
Tabel 4. 4 Upah Minimum di Eks Karesidenan Pekalongan	64
Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan.....	66
Tabel 4. 6 Distribusi Zakat di Eks Karesidenan Pekalongan	68
Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif	69
Tabel 4. 8 Uji Common Effect Model (CEM)	73
Tabel 4. 9 Uji Fixed Effect Model (FEM)	74
Tabel 4. 10 Uji Random Effect Model (REM)	76
Tabel 4. 11 Hasil Uji Chow.....	77
Tabel 4. 12 Hasil Uji Hausman.....	78
Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas	79
Tabel 4. 14 Hasil Uji Multikolienaritas	79
Tabel 4. 15 Hasil Uji heteroskedastisitas	81
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Data Panel	83
Tabel 4. 17 Hasil Uji Parsial (Uji t)	85
Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	88
Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	89

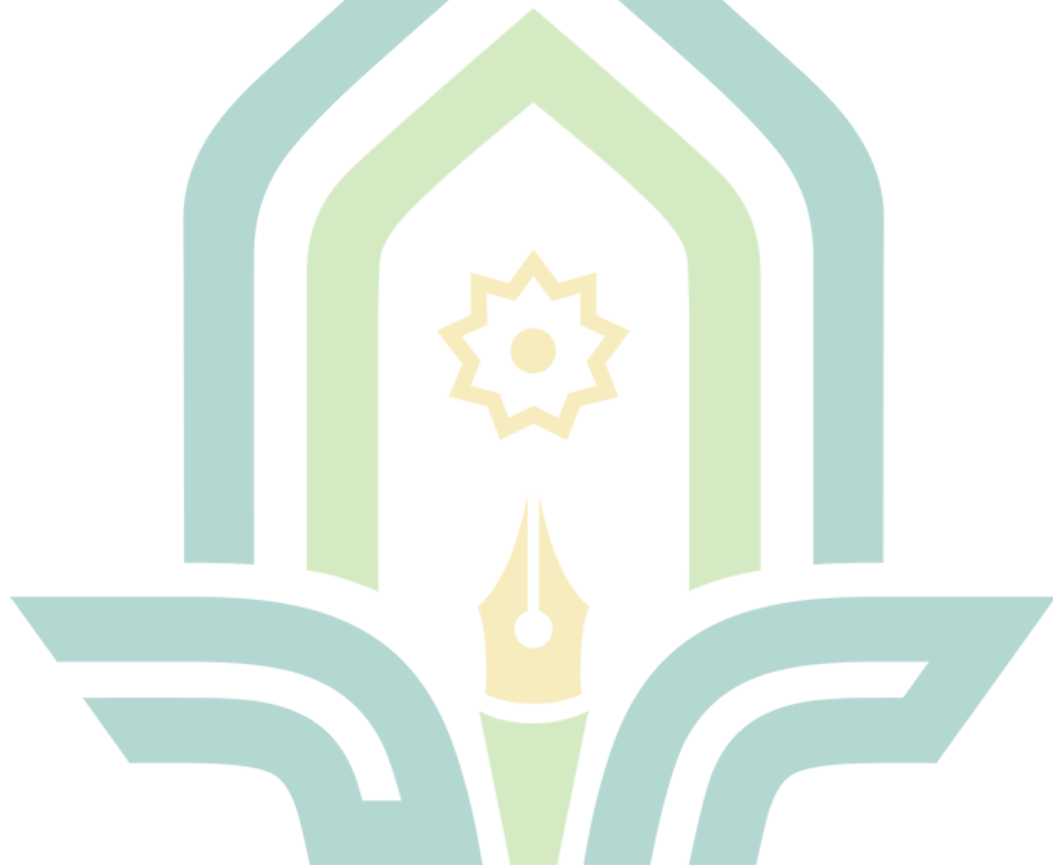
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Eks Karesidenan Pekalongan	3
---	---



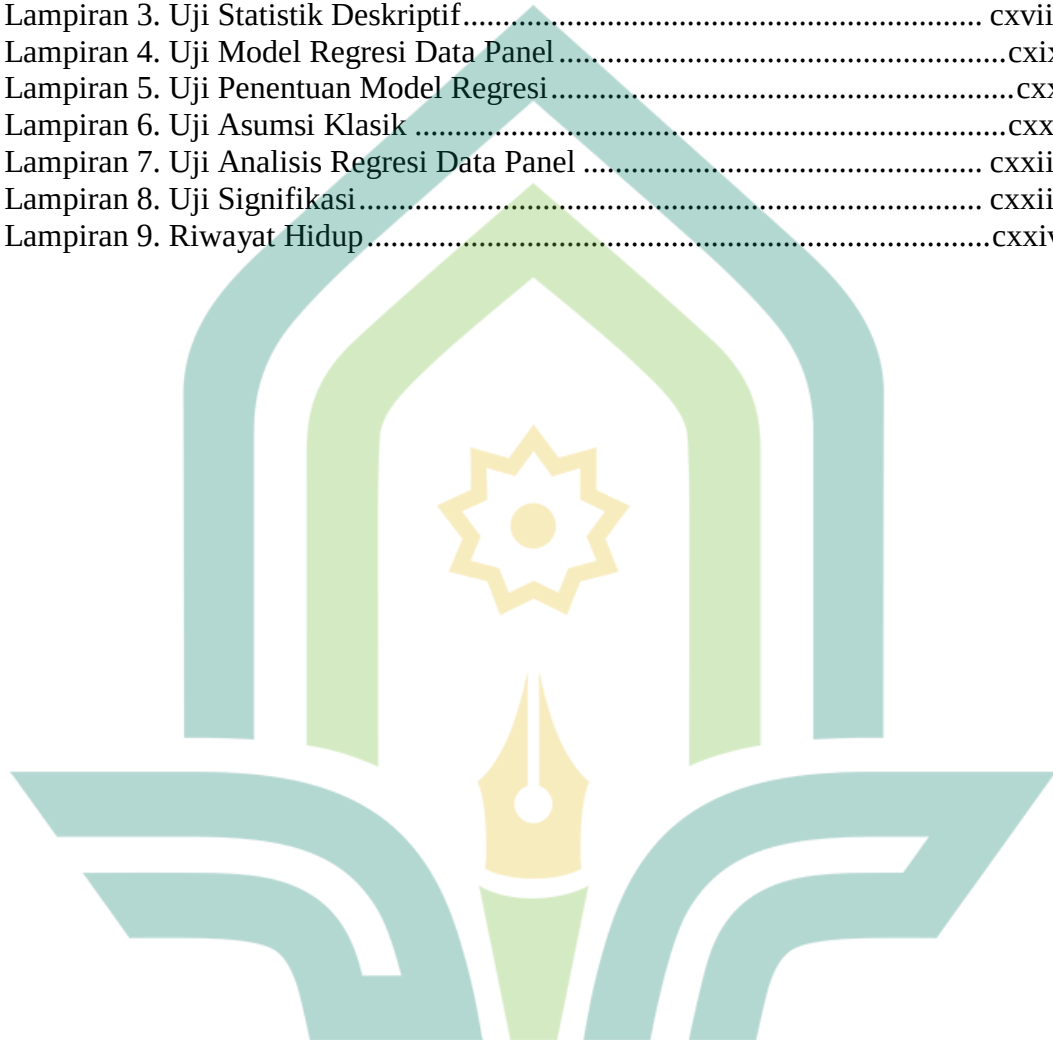
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Upah Minimum Se-Eks Karesidenan Pekalongan (Rupiah)	7
Grafik 1. 2 Distribusi Zakat Eks Karesidenan Pekalongan (Rupiah) 2022-2025 ..	10



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Panel Penelitian	cxvi
Lampiran 2 Transformasi Logaritma Natural (LN)	cxvii
Lampiran 3. Uji Statistik Deskriptif.....	cxviii
Lampiran 4. Uji Model Regresi Data Panel	cxix
Lampiran 5. Uji Penentuan Model Regresi.....	cxx
Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik	cxxi
Lampiran 7. Uji Analisis Regresi Data Panel	cxxiii
Lampiran 8. Uji Signifikasi.....	cxxiii
Lampiran 9. Riwayat Hidup.....	cxxiv



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

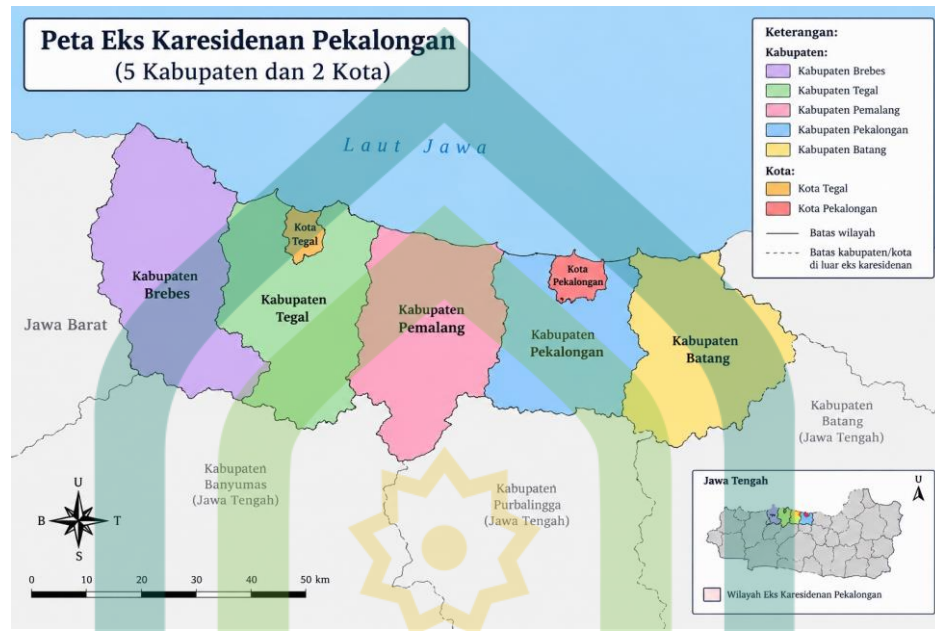
Kemiskinan masih berperan dalam kendala fundamental bagi sebagian negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Situasi ini tidak hanya mencerminkan kendala ekonomi, tetapi juga menandakan ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara memadai. Secara teoritis, kemiskinan diartikan sebagai kondisi sebagian besar populasi yang berada di bawah ambang batas kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana individu atau keluarga tidak sanggup memenuhi kebutuhan paling esensial, baik pangan maupun nonpangan, demi mempertahankan standar hidup yang layak. Kemiskinan umumnya dijadikan parameter untuk mengukur taraf kesejahteraan publik serta efektivitas pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Sari, 2021).

Salah satu penyebab krusial yang memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan antar daerah dan segmen populasi. Ketidaksetaraan ini berkontribusi pada pelebaran jurang kesejahteraan yang signifikan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, hasil yang dicapai belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang menunjukkan adanya tren penurunan, namun secara kualitas dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat (Tisniwati, 2012).

Fenomena ketimpangan tersebut tampak jelas pada tingkat provinsi, salah satunya di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2024 masih berada di kisaran 10 persen, jauh di atas rata-rata nasional, meskipun tren beberapa tahun terakhir menunjukkan arah penurunan seiring membaiknya kondisi perekonomian pascapandemi Covid-19. Di dalam wilayah Jawa Tengah sendiri, kemiskinan banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir utara (pantura), salah satunya di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan (Mufidah & Azizah, 2024).

Eks Karesidenan dalam konteks BPS (Badan Pusat Statistik) bukanlah sebuah satuan wilayah administrasi pemerintahan yang resmi saat ini, melainkan sebuah pengelompokan wilayah geografis historis yang digunakan oleh BPS untuk menganalisis, membandingkan, dan menyajikan data statistik lintas kabupaten/kota. Secara historis karesidenan adalah wilayah administratif bentukan kolonial Hindia Belanda yang menggabungkan beberapa kabupaten. Walau struktur pemerintahannya sudah dihapus sejak tahun 1950-an, BPS tetap menggunakan istilah Eks Karesidenan secara informal untuk menyederhanakan penyajian data regional (Badan Pusat Statistik, 2020).

Gambar 1. 1 Peta Eks Karesidenan Pekalongan



Ditinjau dari pembagian administratifnya Eks Karesidenan Pekalongan mencakup lima kabupaten yaitu Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes serta dua kota yakni Pekalongan dan Tegal. Meskipun berada dalam satu wilayah eks karesidenan yang sama, kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah menunjukkan karakteristik yang berbeda, baik dari sisi tingkat kemiskinan, pengangguran, kualitas pembangunan manusia, jumlah penduduk, maupun kondisi pasar tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2025) Untuk melihat lebih jelas perbedaan tersebut, khususnya dari sisi tingkat kemiskinan, berikut disajikan data persentase penduduk miskin di masing-masing wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

Tabel 1. 1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Pekalongan (Persen), 2019-2025

Daerah	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jawa Tengah	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77	10,47	9,48
Kab. Batang	8,35	9,13	9,68	8,98	8,92	8,73	7,79
Kab. Pekalongan	9,71	10,19	10,57	9,67	9,67	8,95	8,05
Kab. Pemalang	15,41	16,06	16,56	15,06	15,03	14,92	13,32
Kab. Tegal	7,64	8,14	8,6	7,9	7,3	6,81	6,16
Kab. Brebes	16,22	17,03	17,43	16,06	15,78	15,6	14,15
Kota Pekalongan	6,6	7,17	7,59	7	6,81	6,71	6,14
Kota Tegal	7,74	7,8	8,12	7,91	7,68	7,64	7,28

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Berdasarkan informasi table 1.1 diatas pada tahun 2019-2025 tingkat kemiskinan tertinggi di eks karesidenan pekalongan konsisten dipegang oleh kabupaten Brebes dan Pemalang, Meskipun ada tren penurunan dari periode ke periode penurunannya masih berlangsung secara bertahap dan belum mampu menghilangkan permasalahan kemiskinan secara signifikan.

Dalam kajian kemiskinan variabel pengangguran terutama yang tercermin pada TPT, sering dijadikan salah satu faktor penyebab. Pengangguran terjadi karena pasar kerja tidak mampu menyerap seluruh pencari kerja. Tanpa pekerjaan, seseorang tidak punya pemasukan tetap, sehingga kemampuan konsumsinya melemah dan lebih rentan jatuh miskin (Qomarina et al., 2025).

Seperti tingkat pengangguran di Eks Karesidenan Pekalongan yang masih menjadi permasalahan serius yang memengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah. Meskipun Eks Karesidenan Pekalongan memiliki potensi di sektor pertanian dan industri,

namun ketidakseimbangan antara kompetensi angkatan kerja lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja menyebabkan tingginya angka pengangguran (Febrayanto et al., 2025).

Tabel 1. 2 Presentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan Pekalongan (Persen), 2019-2025

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Pekalongan	5.80	7.02	6.89	4.98	5.02	4.91	4.83
Kabupaten Pekalongan	5.80	7.02	6.89	4.98	5.02	4.91	4.83
Kabupaten Batang	4.11	6.92	6.59	6.64	6.06	5.67	5.07
Kabupaten Pemalang	6.45	7.64	6.71	6.63	6.55	6.63	6.61
Kota Tegal	8.08	8.40	8.25	6.68	6.05	5.88	5.82
Kabupaten Tegal	8.12	9.82	9.97	9.64	8.60	7.53	7.61
Kabupaten Brebes	7.39	9.83	9.78	9.48	8.98	8.35	8.07

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 tingkat pengangguran di sebagian besar wilayah eks Karesidenan Pekalongan mengalami lonjakan tajam pada 2020-2021 akibat pandemi COVID-19, sebelum berangsur menurun pada 2022-2025. Namun demikian, penurunan tersebut tidak berjalan seragam. Kabupaten Brebes, misalnya, justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi di kawasan ini pada 2025 (8,07%), melampaui Kabupaten Tegal (7,61%) dan Kabupaten Pemalang (6,61%).

Hal ini mengindikasikan perbaikan pada pasar tenaga kerja, meskipun belum sepenuhnya pulih ke level prapandemi. Berkurangnya angka pengangguran menandakan peningkatan serapan tenaga kerja, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penurunan tingkat pengangguran juga berkontribusi pada

pengurangan tingkat kemiskinan.

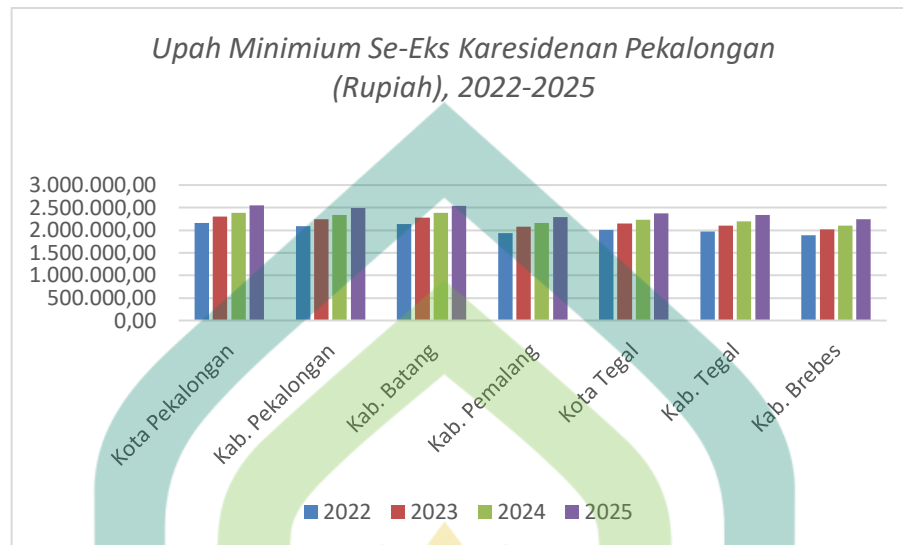
Perkembangan lebih lanjut telah menimbulkan berbagai perspektif mengenai korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menghasilkan temuan yang bervariasi. Dalam studi yang dilakukan oleh Adinda Afrilia Puteri et al., (2024) ditemukan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berkorelasi tidak signifikan dengan tingkat kemiskinan. Sedangkan pada penelitian Wiradyatmika & Sudiana (2013) dan Azizah et al. (2024) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial dari jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, di mana peningkatan pengangguran berimplikasi pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yakni parameter yang ditujukan untuk menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. TPAK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dengan keseluruhan penduduk usia kerja (Silvie & Hasmarini, 2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga berperan krusial. Meskipun secara teoritis TPAK yang tinggi mengindikasikan produktivitas masyarakat, realitanya sejumlah studi nasional menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara TPAK dan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat yang bekerja atau aktif mencari kerja, kualitas pekerjaan yang tersedia belum mampu mengangkat mereka dari kemiskinan (Muttaqin & Anwar, 2023).

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengaruh TPAK terhadap kemiskinan masih belum konsisten, pada peneliti Fitria & Novita, (2024) menyampaikan bahwa TPAK tidak memiliki korelasi tidak signifikan dengan tingkat kemiskinan, namun pada penelitian lain Widyawati et al. (2025) menunjukan TPAK justru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Upah berfungsi sebagai salah satu tolak ukur untuk menilai daya beli dan taraf kesejahteraan masyarakat. Jumlah penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap kapabilitas mereka dalam memenuhi kebutuhan primer sehari-hari (M. J. Pratiwi & Harsono, 2023). Penetapan jumlah gaji minimum merupakan kewenangan gubernur, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti situasi ekonomi regional, tingkat inflasi, indeks harga konsumen, serta situasi pasar tenaga kerja. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan, terdapat dua klasifikasi upah minimum, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (A. P. Putri et al., 2024).

Grafik 1. 1 Upah Minimum Se-Eks Karesidenan Pekalongan (Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Berdasarkan ilustrasi diatas upah minimum kabupaten/kota (UMK) di seluruh wilayah eks Karesidenan Pekalongan naik setiap tahun, tetapi Kabupaten Brebes secara konsisten menjadi daerah dengan UMK terendah sepanjang 2022-2025, hanya mencapai Rp2.239.801 pada 2025, jauh di bawah Kota Pekalongan yang telah mencapai Rp2.545.138. Rendahnya standar upah ini turut membatasi daya beli pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang sudah tinggi (M. J. Pratiwi & Harsono, 2023).

Kondisi ini kemudian memicu perbedaan interpretasi dalam berbagai studi mengenai dampak upah minimum terhadap angka kemiskinan. Penelitian Hapsari Wiji Utamia & Masjkuri (2018) menemukan bahwa upah minimum memiliki korelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Implikasinya, kenaikan upah minimum diasosiasikan dengan penurunan populasi penduduk miskin. Kontras dengan temuan tersebut, penelitian Satria Yuda Anggriawan

(2021) menunjukkan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan upah minimum justru dapat berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan.

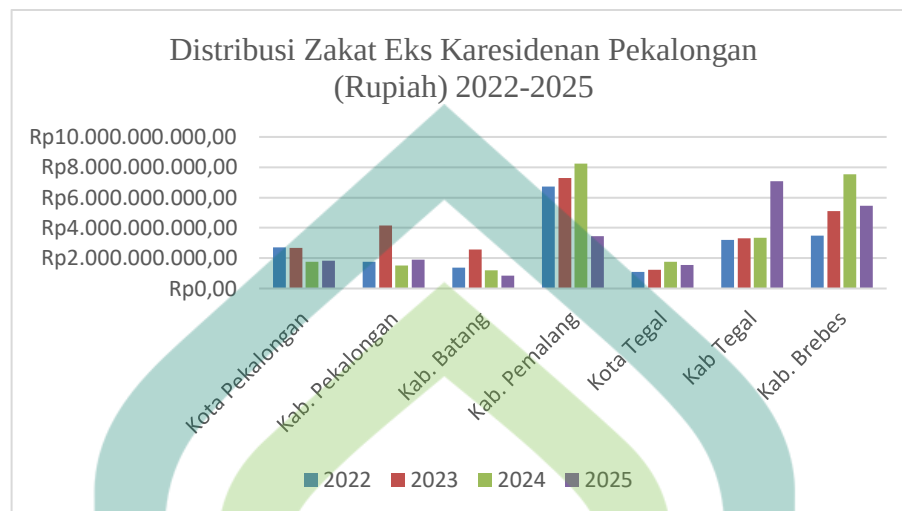
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menjadi elemen krusial yang berdampak pada kemiskinan di sebuah wilayah. IPM merupakan sebuah ukuran komposit yang mengevaluasi kemajuan pembangunan sumber daya manusia berdasarkan tiga dimensi fundamental: kesehatan direpresentasikan melalui usia harapan hidup. Dimensi pendidikan dinilai dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah serta lama sekolah yang diharapkan, sedangkan kelayakan standar hidup diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang sudah disesuaikan) (Azfirmawarman et al., 2023). Peningkatan skor IPM di suatu wilayah akan mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, yang secara inheren akan mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan penduduk, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan (Azfirmawarman et al., 2023).

Studi ini konsisten dengan temuan Ita Pingkan Fasnier Rorong, (2022) yang menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki korelasi negative dengan tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Namun, terdapat hasil yang berbeda dalam studi oleh Sayifullah & Gandasari, (2016) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap kemiskinan. IPM mencakup tiga dimensi esensial pembangunan: harapan hidup yang panjang

dan sehat (Longevity and healthy life), akses terhadap pengetahuan (the knowledge), serta kemampuan untuk memperoleh standar hidup yang layak. Dengan demikian, ketiga dimensi krusial dalam pembangunan manusia ini secara substansial memengaruhi tingkat kemiskinan.

Selain faktor-faktor ekonomi yang lazim dibahas, kerangka ekonomi Islam memperkenalkan suatu instrumen distribusi kekayaan yang memiliki potensi besar dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu zakat. Zakat ialah suatu kewajiban Muslim yang memenuhi syarat kecukupan harta untuk menyetorkan sebagian kekayaannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Dari sudut pandang ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sekaligus mengurangi disparitas sosial (Ismail, 2020). Dalam praktiknya potensi zakat di daerah seperti eks Karesidenan Pekalongan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya tingkat kemiskinan yang substansial, meskipun telah terdapat institusi yang mengelola dana zakat.

Grafik 1. 2 Distribusi Zakat Eks Karesidenan Pekalongan (Rupiah) 2022-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Berdasarkan ilustrasi diatas penyaluran dana zakat di sebagian besar daerah eks Karesidenan Pekalongan justru meningkat sepanjang 2022-2025, seperti Kabupaten Brebes yang naik dari Rp3,50 miliar (2022) menjadi Rp7,52 miliar (2024) maupun Kabupaten Tegal yang melonjak menjadi Rp7,09 miliar pada 2025. Ini menunjukkan bahwa zakat mampu untuk mengurangi penduduk miskin tetapi di berbagai penelitian mengenai zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, masih ditemukan perbedaan hasil yang menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Y. D. Putri et al. (2020) menemukan hasil yaitu penyaluran dan zakat berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, yang berarti semakin besar penyaluran zakat maka semakin mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun penelitian Shafarani et al. (2023) menemukan bahwa penyaluran dana zakat berpengaruh positif terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan zakat belum efektif dalam mengurangi kemiskinan, kemungkinan disebabkan oleh pengelolaan

yang belum optimal, penyaluran yang kurang tepat sasaran, atau pemanfaatan yang masih bersifat konsumtif. Perbedaan temuan ini mencerminkan bahwa efektivitas zakat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berbagai penelitian sebelumnya mencerminkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan zakat. Namun, hasil penelitian terkait pengaruh variabel-variabel tersebut masih menunjukkan perbedaan sesuai dengan kondisi ekonomi dan karakteristik daerah masing-masing. Meskipun kajian mengenai kemiskinan telah banyak dilakukan, penelitian yang membahas pengaruh keempat variabel tersebut secara simultan terhadap tingkat kemiskinan eks karesidenan pekalongan masih terbatas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan Di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2019-2025”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, perumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025?

2. Apakah tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025?
3. Apakah upah minimum berpengaruh tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025?
4. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025?
5. Apakah penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025?
6. Apakah Tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan penyaluran dana zakat secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.
3. Untuk mengetahui upah minimum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.

4. Untuk mengetahui indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.
5. Untuk mengetahui penyaluran dana zakat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.
6. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia dan penyaluran dana zakat secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Studi ini ditujukan untuk menambah kajian ilmu ekonomi pembangunan khususnya pada Program Studi Ekonomi Syariah melalui pengembangan model analisis kemiskinan yang mengintegrasikan variabel makroekonomi konvensional (tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia) dengan instrumen distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam yaitu zakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan konsep kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan berbasis sinergi antara kebijakan pembangunan ekonomi dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Kajian yang dilakukan diharapkan menjadi sumber rujukan dan

pertimbangan bagi pemerintah daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang mempertimbangkan faktor ketenagakerjaan, upah minimum, pembangunan sumber daya manusia, dan optimalisasi peran zakat.

b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS)

Melalui kajian ini berfungsi menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam menilai efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan sekaligus pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang tertarik menelaah determinan kemiskinan.

E. Sistematika Pembahasan

Studi ini dirancang mengikuti susunan sistematis tertentu agar mampu memberikan gambaran umum sekaligus menyajikan informasi yang jelas mengenai objek yang sedang dikaji oleh peneliti dan mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan deskripsi mengenai konteks timbulnya persoalan, formulasi isu-isu yang diajukan, target yang diharapkan terealisasi dalam studi, kontribusi studi, serta kerangka penyusunan laporan yang diterapkan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini menguraikan fondasi teoritis yang mendasari kajian, tinjauan

atas riset-riset terdahulu, kerangka konseptual, serta formulasi hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini dirinci berbagai elemen metodologi studi, meliputi jenis dan rancangan yang dipakai, lokasi atau konteks studi, keseluruhan subjek dan bagian terpilih yang dikaji, parameter studi, sumber informasi, metode perolehan informasi, sampai dengan metode yang diterapkan untuk analisis informasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memaparkan hasil pengolahan data Tingkat pengangguran terbuka, Tingkat partisipasi Angkatan kerja, upah minimum, indeks pembnagunan manusia, dan penyaluran dana zakat terhadap Tingkat kemiskinan eks karesidenan pekalongan tahun 2019-2025 serta analisis terhadap data tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab kelima disajikan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dilengkapi dengan penarikan Kesimpulan, serta pemaparan berbagai saran yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan teori

1. *Grand Theory : Theory Vicious Circle of Poverty*

Kemiskinan dapat dipahami melalui berbagai sudut pandang, pendapat, serta indikator yang pada akhirnya dapat membentuk suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus, kondisi tersebut sejalan dengan teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse periode 1953 yang dikutip dalam Rohima & Budiyanto, (2024). Salah satu aspek penting yang berperan dalam mempertahankan kemiskinan dan keterbelakangan adalah keterbatasan akses. Ketika individu atau berbagai lapisan penduduk tidak memperoleh akses yang memadai terhadap berbagai sarana dan kesempatan, ruang untuk menentukan pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi semakin sempit. Akibatnya, mereka cenderung hanya mampu melakukan hal-hal yang dapat dilakukan dalam kondisi saat ini, bukan menentukan pilihan berdasarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk memperbaiki kehidupannya. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat membuat masyarakat tetap berada dalam kondisi kemiskinan (Rohima & Budiyanto, 2024).

Dalam penelitian ini, keterbatasan akses tersebut tercermin pada kelima variabel bebas yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja

menggambarkan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, sedangkan upah minimum menggambarkan akses terhadap penghasilan yang layak. Indeks pembangunan manusia menggambarkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak, sementara zakat menjadi bentuk intervensi yang memperluas akses kelompok miskin terhadap sumber daya dan modal. Ketika akses-akses tersebut terbatas, pilihan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup menjadi sempit dan kemiskinan terus berulang. Sebaliknya, semakin luas akses yang dimiliki, semakin besar peluang masyarakat memutus lingkaran kemiskinan (Rohima & Budiyanto, 2024).

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan mengacu pada keadaan di mana seseorang atau keluarga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan esensial, termasuk pangan, pakaian, dan hunian. Di Indonesia isu kemiskinan tergolong sebagai salah satu permasalahan sosial yang paling kritis dan rumit. Sekalipun berbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh pemerintah, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan di tanah air masih berada pada angka yang signifikan dan memiliki persebaran di berbagai kawasan, baik pada area perkotaan atau pedesaan (A. E. Pratiwi et al., 2024). Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai persentase dari total penduduk yang memiliki pendapatan keluarga di bawah ambang batas tertentu yang disebut garis kemiskinan (Mankiw, 2006).

Garis kemiskinan diukur dalam satuan rupiah dan ditentukan berdasarkan kesanggupan daya beli masyarakat atau purchasing power parity (PPP). Indikator ini mengindikasikan jumlah minimum belanja yang esensial bagi seorang individu untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Di Indonesia ambang batas kemiskinan ditetapkan sekitar Rp37.949,00 per hari. Sementara itu kondisi yang lebih parah yaitu kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai individu yang hidup dengan pengeluaran di bawah Rp35.037,93 per hari. Standar ini digunakan secara internasional oleh lembaga seperti Bank Dunia untuk menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan (Mirawati & Feriyanto, 2023).

Pengukuran level kemiskinan tidak hanya bertumpu pada faktor ekonomi semata, seperti penghasilan ataupun pengeluaran rumah tangga. Evaluasi terkini juga memasukkan berbagai dimensi krusial lainnya, termasuk keterjangkauan terhadap layanan edukasi, sarana kesehatan, pasokan air bersih, serta hunian yang memadai. Perspektif konvensional mengenai kemiskinan, sebagaimana diartikulasikan oleh Thomas Malthus, menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Malthus menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga amal atau pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan justru dapat berlawanan arah, dikarenakan akan mendorong individu dari kalangan kurang mampu untuk terus bereproduksi, sehingga menambah beban (Mankiw, 2006).

Islam memandang kemiskinan sebagai permasalahan yang kompleks, yang tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga berdampak pada keseimbangan spiritual dan interaksi sosial mereka. Al-Qur'an secara tegas menyebut istilah "fakir" dan "miskin" untuk menekankan pentingnya perhatian dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan batiniah seperti rasa aman, harga diri, dan keimanan (Ismail, 2020).

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Pengertian Pengangguran

Pengangguran mendeskripsikan situasi di mana individu dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan meskipun memiliki kemauan untuk bekerja. Individu yang tidak bekerja dan tidak secara aktif mencari pekerjaan umumnya tidak diklasifikasikan sebagai pengangguran. Lonjakan dalam tingkat pengangguran sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja, di mana suplai angkatan kerja melebihi permintaan akan kesempatan kerja oleh perusahaan atau sektor ekonomi (Yulistiyono, 2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi individu yang menganggur dari keseluruhan angkatan kerja. Definisi ini mencakup seluruh penduduk yang aktif mencari kerja, sedang dalam proses memulai suatu usaha, tidak aktif mencari kerja karena pesimisme terhadap ketersediaan lapangan

kerja, serta mereka yang telah menerima tawaran pekerjaan namun belum memulai tugasnya. (Tervia et al., 2020).

Menurut Lewis yang dikutip dalam penelitian milik (Amalia, 2012), teori pembangunan yang khusus dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, terutama yang mengalami kelebihan tenaga kerja. Dalam banyak kasus, negara-negara ini memiliki jumlah tenaga kerja yang melimpah, namun di sisi lain justru mengalami kekurangan modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain itu ketersediaan lahan yang belum dimanfaatkan pun sangat terbatas, sehingga mempersempit peluang ekspansi sektor produksi. Ketimpangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kelangkaan sumber daya produktif ini menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (Amalia, 2012).

b. Jenis-Jenis Pengangguran

Menurut Mankiw, pengangguran tidak hanya dipahami sebagai kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan alasan mengapa individu tersebut menganggur (Mankiw et al., 2012). Kategori-kategori ini mencerminkan keragaman kondisi dalam pasar tenaga kerja dan dikategorikan sebagai berikut.

1) Pengangguran *friksional*

Jenis pengangguran yang biasanya sementara dan terjadi dalam jangka pendek. Terjadi karena proses transisi alami di pasar tenaga kerja, ketika orang mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan preferensi mereka. Misalnya, lulusan baru yang sedang mencari pekerjaan pertama atau pekerja yang berpindah kerja karena alasan pribadi.

2) Pengangguran *Struktural*

Hasil dari ketidaksesuaian jangka panjang antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri. Pengangguran jenis ini dapat disebabkan oleh perkembangan teknologi, otomatisasi. Misalnya, hilangnya pekerjaan karyawan di pabrik karena perusahaan beralih ke teknologi otomatis.

3) Pengangguran *Siklis*

Kondisi yang terkait erat dengan siklus ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada melemahnya permintaan barang dan jasa di pasar. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan menekan jumlah produksi karena berkurangnya penjualan. Sebagai konsekuensinya perusahaan sering kali melakukan pengurangan tenaga kerja untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu pengangguran *siklis* adalah hasil dari penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Yollit Permata Sari, 2021).

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran fundamental dalam studi ekonomi ketenagakerjaan. Indikator ini berfungsi untuk mencerminkan rasio penduduk dalam usia produktif (berusia 15 tahun ke atas) yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Apabila TPAK menunjukkan angka yang rendah, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya keterbatasan kesempatan kerja, yang mengakibatkan sebagian besar individu usia kerja tidak mendapatkan penyerapan di pasar tenaga kerja (Ariesti & Asmara, 2023).

Perhitungan melibatkan pembagian antara jumlah angkatan kerja dengan total populasi pada usia kerja, yang kemudian dikonversikan menjadi persentase melalui perkalian dengan 100. Sebagai ilustrasi, jika suatu negara memiliki 100 juta orang dalam kelompok usia kerja dan 70 juta di antaranya tergolong sebagai angkatan kerja, maka TPAK-nya sebesar 70%. Besaran TPAK memegang peranan krusial dalam evaluasi potensi ketersediaan tenaga kerja yang dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan kemajuan perekonomian suatu negara. Peningkatan TPAK secara umum berkorelasi dengan peningkatan kontribusi sumber daya manusia terhadap kapasitas produktif dan perkembangan ekonomi nasional (Badan Pusat Statistik, 2024).

Menurut Oktaviani & Tanti Novianti (2022) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), antara lain :

a. Pertumbuhan UMKM

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk dari masyarakat menengah ke bawah, UMKM adalah penyedia lapangan pekerjaan dan pemberdayaan terbesar. Mereka juga membantu pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan pasar baru dan menjadi sumber produk dan komoditas baru untuk memenuhi permintaan pasar.

c. Konsumsi Rumah Tangga

Ketika perekonomian negara berada dalam kondisi yang stabil dan berkembang, hal ini tercermin dari tingginya tingkat konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang besar mendorong peningkatan produksi.

d. Upah Minimum

Merujuk pada tarif gaji terendah yang diperbolehkan untuk dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya. Perusahaan dilarang menetapkan kompensasi di bawah ambang batas upah minimum tersebut. Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki dampak yang cukup besar terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kenaikan UMP berpotensi mendorong individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja, namun penetapan yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator yang berkaitan dengan angka kemiskinan. Tingkat TPAK yang rendah mengindikasikan sebagian besar penduduk usia produktif belum turut serta dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada rendahnya pendapatan masyarakat. Sebaliknya, peningkatan TPAK mencerminkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pasar kerja, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan memperluas kesempatan ekonomi, sehingga berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan (Handani & Suhariato, 2025).

5. Upah Minimum

a. Definisi Upah Minimum

Sistem upah adalah sistem di mana kontrak pekerjaan ditetapkan oleh pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dalam kegiatan usaha, tenaga kerja dijanjikan untuk menerima upah dari pemilik usaha. Menurut istilah, Sistem pengupahan merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan kerja yang pelaksanaannya diatur melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, serta mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja atau buruh melalui sistem pembayaran upah (Rasji & Susanto, 2023).

Upah minimum adalah ketetapan pemerintah yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi tenaga kerja, memastikan mereka

menerima kompensasi yang memadai untuk memenuhi standar kebutuhan hidup. Melalui regulasi ini, entitas bisnis diwajibkan untuk membayar upah setidaknya pada level standar kebutuhan hidup layak (KHL), terutama untuk posisi pada jenjang karir paling awal (Nazwa Naisniatunnisa Sholihah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024). Selain itu pada Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengamanatkan pemerintah untuk merancang kebijakan pengupahan yang menjamin hak pekerja atas standar hidup yang layak dan pantas. Dalam implementasinya, gubernur diberi wewenang untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jika nominalnya melebihi UMP. Penetapan nominal upah minimum ini mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan ketenagakerjaan spesifik di setiap wilayah. (Nazwa Naisniatunnisa Sholihah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024).

Upah minimum memberikan pengaruh signifikan terhadap pasar tenaga kerja kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh rendahnya upah keseimbangan pada tenaga kerja muda, mengingat remaja umumnya menempati segmen pasar tenaga kerja dengan tingkat keterampilan dan pengalaman yang masih minim. Selain itu, remaja kerap bersedia menerima bayaran yang lebih rendah sebagai bentuk kompensasi atas kesempatan mendapatkan pengalaman kerja atau pelatihan. Bahkan, sebagian dari mereka rela menjalani magang tanpa menerima upah (Mankiw, 2006).

Tujuan utama diberlakukannya kebijakan upah minimum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar para pekerja, mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata di masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kondisi kerja yang adil serta menyeimbangkan kepentingan antara pekerja dan pihak pemberi kerja. Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan upah minimum kerap menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah disparitas kemampuan ekonomi antarwilayah dan perbedaan karakteristik sektor industri yang sangat beragam (Trimaya, 2014).

Konsep upah yang adil merujuk pada besaran imbalan yang wajib dibayarkan kepada para pekerja sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan tenaga mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak di tengah masyarakat. Menurut pemikiran Ibnu Taimiyah, keadilan dalam penetapan upah ini berkaitan erat dengan harga pasar tenaga kerja yang berlaku saat itu (ta'sir fil a'mal). Dalam hal ini, beliau memperkenalkan istilah *ujrah al-mitsl*, yang berarti upah yang setara atau wajar berdasarkan standar umum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, upah yang adil tidak hanya mencerminkan nilai ekonomi suatu pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan keadilan distributif sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam (Yono, 2021).

b. Teori Upah Normal

Teori Upah Normal (*natural wage*) yang dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817 yang dikutip dalam Nurcahyaningtyas, (2009). Menurutnya upah yang wajar adalah upah yang didasarkan pada biaya hidup keluarga pekerja serta disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Biaya hidup tersebut meliputi kebutuhan minimal untuk hidup, seperti kesehatan, perumahan, dan fasilitas lain. Namun Ricardo juga menegaskan bahwa kemampuan perusahaan bergantung pada kapasitas produksi dan hasil penjualan. Jika persaingan tenaga kerja ketat, upah cenderung turun mendekati batas minimum upah kerja. Karena itu upah minimum berperan menjaga agar upah tidak turun di bawah batas kebutuhan hidup minimal, selama masih dalam kemampuan perusahaan.

6. Indeks Pembangunan Manusia

a. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Konsep Pembangunan Manusia dikemukakan oleh Program (UNDP) dalam laporan tahunan berjudul *Human Development Report* periode 1996 kemudian dilanjutkan secara berkala. Dalam publikasi tersebut, pembangunan manusia diartikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*”, yang merujuk pada suatu proses peningkatan berbagai pilihan dalam kehidupan masyarakat. Aspek-aspek krusial dalam kehidupan ini dievaluasi berdasarkan usia harapan hidup yang panjang dan sehat, akses terhadap pengetahuan melalui pendidikan yang memadai, serta ketersediaan standar hidup yang layak. Lebih lanjut,

UNDP secara khusus mengidentifikasi empat unsur fundamental dalam kerangka pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), keadilan atau pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*) (Setiawan & Hakim, 2013).

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab atas perhitungan dan publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara garis besar, BPS mengadopsi metodologi pengukuran pembangunan manusia yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). BPS senantiasa mengikuti setiap pembaruan yang dikeluarkan oleh UNDP terkait perhitungan IPM, baik dalam hal indikator maupun metode penghitungan. Sejak tahun 2015, metode penghitungan IPM di Indonesia telah mengimplementasikan pembaruan yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014, yang kemudian menjadi standar acuan hingga kini. Dalam pemilihan indikator yang digunakan, IPM Indonesia tetap berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh UNDP. Kendati demikian, terdapat perbedaan pada salah satu indikator dalam dimensi standar hidup layak, yang disebabkan oleh ketiadaan indikator sepadan di tingkat subnasional Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibandingkan dengan yang diadopsi oleh UNDP (Badan Pusat Statistik, 2023)

b. Komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi

dasar, yaitu derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Derajat kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir. Tingkat pendidikan dinilai dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk. Sementara itu, taraf hidup yang layak menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan. (F Fauzi, 2017).

7. Penyaluran Dana Zakat

a. Definisi zakat

Secara istilah zakat diartikan sebagian harta yang telah mencapai syarat tertentu untuk disalurkan kepada kelompok penerima yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Berlaku untuk individu yang telah mencapai nisab dan haul. Pada ajaran islam zakat memiliki fungsi yang penting dikarenakan termasuk salah satu rukun Islam ke 3, sehingga pelaksanaannya menjadi bentuk ketaatan sekaligus kepedulian sosial terhadap sesama (Munandar et al., 2020).

b. Jenis-jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama:

1) Zakat fitrah

Berkaitan dengan diri dan wajib dikeluarkan sebelum pelaksanaan Hari Raya Idulfitri. Besarnya ialah satu sha' atau sekitar 2,5 kg makanan utama, seperti beras, untuk setiap orang. bertujuan menyempurnakan ibadah puasa dengan membersihkan

diri dari perbuatan yang kurang baik maupun sia-sia selama bulan Ramadan (Chaerunnisa et al., 2025).

2) Zakat Mal

Kewajiban yang dikenakan atas harta yang memiliki nilai guna secara ekonomi serta diperoleh dengan tata cara sesuai dengan pedoman. Menurut Rahmi (2021), zakat maal dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, sehingga jenis-jenis harta yang wajib dizakati menjadi semakin beragam, di antaranya yaitu sebagai berikut.

a) Zakat emas dan perak

Kepemilikan logam mulia yang telah mencapai jumlah minimum tertentu (nisab) wajib dikenakan zakat. Dalam kaidah fikih, kadar nisab untuk zakat emas adalah 20 dinar, yang setara dengan 85 gram emas. Jika kepemilikan telah memenuhi ambang batas ini dan telah berlalu satu tahun (haul), maka zakat yang terutang adalah 2,5% dari total nilai aset tersebut (Zannah et al., 2024).

b) Zakat Perdagangan

Diterapkan pada keuntungan atau aset yang dihasilkan dari transaksi jual beli serta kegiatan komersial. Proporsi zakat yang wajib dibayarkan ialah 2,5% dari total keuntungan atau aset perdagangan, apabila telah mencapai ambang batas (nisab) yang setara dengan 85 gram emas.

c) Zakat Perternakan

Dikenakan pada hewan ternak, meliputi sapi, kambing, dan domba. Jumlah zakat yang perlu dikeluarkan diatur berdasarkan jenis ternak dan kuantitas hewan yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Zannah et al., 2024).

c. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat adalah proses pendistribusian dana yang telah dihimpun dari muzakki (orang yang membayar zakat) kepada mustahik (pihak yang berhak menerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran dana zakat bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong upaya pengentasan kemiskinan (Raihan Al Kuwaity Putra Muttaqin, 2022).

Dana dari berbagai jenis zakat inilah yang dihimpun oleh Badan zakat nasional (BAZNAS), kemudian disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana ditetapkan. Agar dana yang terkumpul tepat sasaran, penyalurannya dilakukan melalui dua pola. Pola pertama adalah penyaluran konsumtif, yakni bantuan yang langsung diberikan kepada mustahik guna menutup kebutuhan dasar mereka. Pola kedua adalah penyaluran produktif, yakni upaya memberdayakan ekonomi mustahik lewat pemberian modal usaha,

pelatihan keterampilan (Musnaeni & Khasanah, 2025).

d. Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi islam ini dikembangkan oleh Umar Chapra pada tahun 1992 yang dikutip dari Saprida et al., (2021). Menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang terbatas sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Penerapan prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan individu, keseimbangan ekonomi dan lingkungan, serta solidaritas sosial. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan Masyarakat.

Menurut pemikiran Umar Chapra, kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan tujuan syariah agar sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu aspek penting dalam pemikiran tersebut adalah alokasi dan distribusi kekayaan yang adil. Distribusi kekayaan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta memberikan kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Dalam konteks ini instrumen ekonomi Islam, seperti zakat dan berbagai bentuk kegiatan sosial ekonomi, dapat berperan dalam membantu masyarakat yang

kurang mampu dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan (Saprida et al., 2021).



B. Telaah Pustaka

Tabel 2. 1 Telaah Pustaka

No	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Pembeda
1.	(Y. D. Putri et al., 2020)	Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat	Distribusi dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat terbukti mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatra Barat	Sama-sama meneliti pengaruh zakat terhadap kemiskinan	Variabel berbeda (tidak ada TPAK, upah minimum dan IPM), lokasi Sumatra Barat.
2.	(Martaliah et al., 2023)	Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2010-2021	Penyaluran dana zakat menunjukkan pengaruh yang signifikan.	Sama-sama meneliti pengaruh IPM dan zakat terhadap kemiskinan .	Penelitian dilakukan di Provinsi Jambi, tidak menggunakan variabel TPAK dan upah minimum
3.	(Sipahutar & Adanan Murroh Nasution, 2023)	Pengaruh Ipm, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera	IPM tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara selama periode 2019-2022.	Sama-sama meneliti pengaruh pengangguran, IPM terhadap kemiskinan .	Lokasi berbeda Sumatra Utara dan penulis di eks karesidenan Pekalongan), tidak meneliti TPAK,

		Utara			upah minimum dan zakat
4.	(Zahra et al., 2024)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Priode 2012-2023	IPM tidak memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung selama periode 2012-2023.	Sama-sama meneliti IPM terhadap kemiskinan	Tidak menggunakan variabel TPAK, upah minimum dan zakat
5.	(Febrianti & Utami, 2024)	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Timur Periode Tahun 2020-2024	Menyatakan bahwa upah minimum tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan	variabel Bebas yang Mirip Pengangguran, IPM dan upah minimum adalah variabel bebas yang muncul di kedua penelitian.	Penelitian ini tidak memasukkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan zakat sebagai variable.

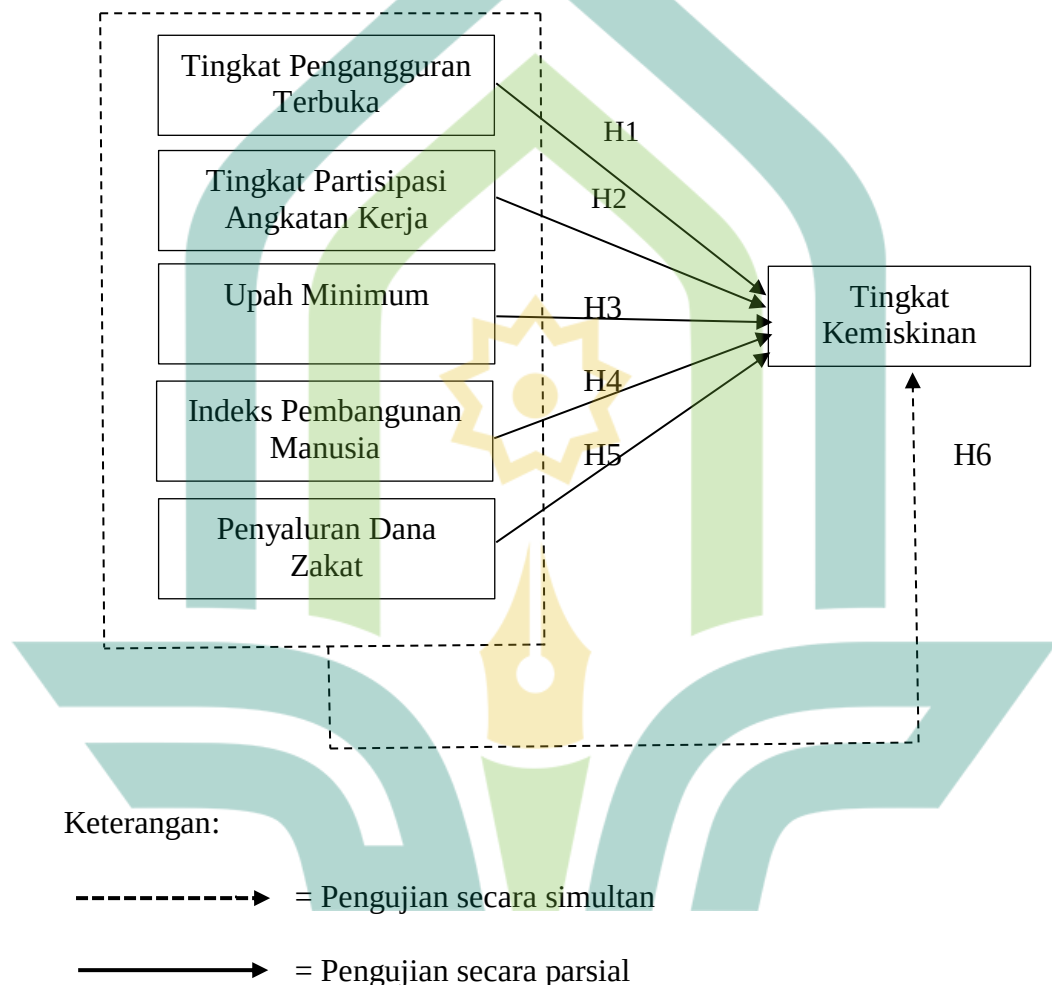
6.	(Adinda Afrilia Puteri et al., 2024)	Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2015-2023.	Temuan riset menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran tidak signifikan dengan kemiskinan di Indonesia.	Membahas pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan	Tidak membahas TPAK, upah minimum, IPM dan Zakat, dan juga cakupan nasional, bukan hanya eks karesidenan Pekalongan
7.	(Azizah et al., 2024)	Analisis Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022 (Azizah et al., 2024)	Studi ini mengindikasikan bahwa pengangguran berkontribusi positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder BPS.	Variabel independen berbeda dan cakupannya nasional
8.	(M. R. D. Kurniawan et al., 2024)	Pengaruh Upah Minimum Dan Pendidikan Terhadap Persentase Kemiskinan Dalam Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Timur 2017-2019 (M. R. D.	Upah minimum memiliki implikasi negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Sama-sama meneliti variabel upah minimum terhadap kemiskinan	Penelitian ini tidak memasukkan pengangguran, tpak, IPM dan zakat sebagai variabel dan lokasi berada di Provinsi Jawa Timur

		Kurniawan et al., 2024)			
9.	(Fitria et al., 2024)	Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.	Analisis parsial menunjukkan bahwa angkatan kerja tidak memiliki korelasi negatif yang berarti dengan kemiskinan di Provinsi Aceh.	Menggunakan variabel TPAK terhadap kemiskinan	Penelitian ini tidak memasukkan pengangguran, upah minimum, IPM dan zakat sebagai variable dan lokasi berada di Provinsi Aceh
10.	(Handani & Suhariato, 2025)	Pengaruh TPT, PDRB, dan TPAK Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2023	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdampak negatif dan substansial terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.	Menggunakan variabel pengangguran dan TPAK	Penelitian ini tidak memasukkan upah minimum, IPM dan zakat sebagai variable dan perbedaan lokasi penelitian

C. Kerangka Berpikir

Untuk menyederhanakan uraian di atas, maka penulis menggambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kerangka Pemikiran Teoritis



Kerangka berfikir yang diuraikan dalam Tabel 2.2 dibentuk melalui identifikasi lima variabel independen, yaitu tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan upah minimum, indeks pembangunan manusia dan penyaluran dana zakat diperhitungkan sebagai faktor yang diduga memengaruhi satu variabel dependen, yaitu tingkat kemiskinan.

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Tingkat Pengangguran terbuka merupakan salah satu persoalan makroekonomi yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Kehilangan pekerjaan tidak hanya menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi individu yang mengalaminya. Oleh karena itu, isu pengangguran sering menjadi perhatian dalam pembahasan ekonomi maupun politik, sehingga berbagai kebijakan pemerintah umumnya diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran (Dwi Puspa, 2016).

Dalam studi yang dilakukan Azizah et al., (2024) pengangguran teramati memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa peningkatan angka pengangguran cenderung beriringan dengan kenaikan angka kemiskinan. Kesimpulan tersebut tidak sejalan dengan hasil riset Adinda Afrilia Puteri et al., (2024) yang mengemukakan bahwa tingkat pengangguran tidak signifikan dengan kemiskinan di Indonesia.

- a. H_{01} : Tingkat Pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan Pekalongan.
- b. H_{a1} : Tingkat Pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan Pekalongan.

2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Tingkat partisipasi angkatan kerja merepresentasikan proporsi penduduk dewasa yang dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Indikator ini memberikan wawasan mengenai sejauh mana populasi memilih untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi formal. Sama halnya dengan perhitungan tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja juga dapat diestimasi untuk keseluruhan populasi dewasa maupun segmen demografis yang lebih terperinci (Wahyuni et al., 2025).

Menurut riset Handani & Suhianto, (2025) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan dampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Kenaikan TPAK diperkirakan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, sejalan dengan bertambahnya individu yang terlibat dalam pasar kerja. Namun, studi yang dilakukan oleh Fitria & Novita, (2024) menyajikan temuan yang berlawanan, di mana TPAK teramati memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Implikasi dari hal ini adalah bahwa, secara statistik, korelasi TPAK dengan kemiskinan tidak dapat dipastikan signifikansinya.

- a. H_{02} : Tingkat partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.
- b. H_{a2} : Tingkat partisipasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Soedarjadi berpendapat bahwa upah minimum adalah sebuah regulasi pemerintah yang mengharuskan entitas bisnis untuk memberikan kompensasi finansial kepada karyawan, dengan jumlah sekurang-kurangnya setara dengan Anggaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk posisi dengan tingkatan terendah (Nazwa Naisniatunnisa Sholihah & Mirna Nur Alia Abdullah, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. R. D. Kurniawan et al., (2024) mengindikasikan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap proporsi kemiskinan di seluruh provinsi Jawa Timur. Namun, temuan yang bertolak belakang diperoleh dari studi oleh Febrianti & Utami, (2024) kenaikan upah minimum regional ternyata belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena mayoritas pekerja miskin bekerja di luar hubungan kerja resmi sehingga berada di luar jangkauan kebijakan tersebut.

- a. H_{03} : Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.
- b. H_{a3} : Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah tolok ukur krusial yang berfungsi untuk mengevaluasi taraf kualitas kehidupan di suatu wilayah. Tujuan IPM adalah menyajikan potret yang lebih holistik mengenai tingkat kemakmuran, yang tidak terbatas pada dimensi ekonomi semata, melainkan juga mempertimbangkan elemen-elemen sosial lain yang berdampak pada eksistensi manusia. IPM mencakup tiga dimensi pokok, yakni aspek pendidikan, kesehatan, serta taraf kemakmuran (Sinaga et al., 2025).

Hasil temuan (Zahra et al., 2024) di Provinsi Lampung memperlihatkan bahwa kenaikan IPM diikuti penurunan kemiskinan secara signifikan. Namun penelitian Sipahutar & Adanan Murroh Nasution, (2023) memperoleh hasil yang bertolak belakang di Sumatera Utara sepanjang 2019-2022 IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, bahkan jumlah penduduk miskin tetap bertambah di tengah upaya peningkatan IPM. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa IPM bukan penentu utama kemiskinan di wilayah itu.

- a. H_{04} : Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.
- b. H_{a4} : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.

5. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Islam mengajarkan bahwa zakat merupakan kewajiban individu bagi seorang Muslim yang juga mencakup tanggung jawab negara dalam pengelolaan dan distribusinya kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat (N. Putri et al., 2023).

Hasil kajian oleh Y. D. Putri et al., (2020) dana zakat terbukti memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga Baznas telah menyalurkan dana zakat secara konsisten kepada masyarakat yang berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Namun temuan yang berbeda disajikan dalam studi oleh Martaliah et al., (2023) yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

- a. H_{05} : Penyaluran dana zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.
- b. H_{a5} : Penyaluran dana zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.

6. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Mengacu pada tinjauan teoritis dan temuan studi terdahulu, terdapat korelasi antara indikator Tingkat pengangguran terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penetapan upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta prevalensi kemiskinan. Kenaikan angka pengangguran secara umum berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan. Sebaliknya partisipasi angkatan kerja yang tinggi, penerapan standar upah minimum yang kuat, dan manajemen zakat yang efektif diasumsikan dapat berkontribusi dalam mitigasi tingkat kemiskinan. Berdasarkan premis tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- a. H_{06} : Tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan penyaluran dana zakat secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.
- b. H_{a6} : Tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan penyaluran dana zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di eks karesidenan pekalongan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan, yang mana metode ini mengandalkan beragam sumber literatur sebagai substrat utama analisis. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur referensi, dokumen dinas, artikel akademis, dan suksesi riset terdahulu yang koheren (Haifa et al., 2025). Data yang dieksplorasi meliputi indikator tingkat pengangguran terbuka, rasio partisipasi angkatan kerja, tarif upah minimum, indeks pembangunan manusia, penyaluran dana zakat, dan parameter kemiskinan. Data ini dikumpulkan dari publikasi institusi pemerintah, terutama melalui portal daring resmi BPS dan BAZNAS.

B. Pendekatan penelitian

Riset ini dikategorikan sebagai riset kuantitatif, di mana metode kuantitatif melibatkan penggunaan data kuantitatif sebagai fondasi untuk menangani isu-isu penelitian. Paradigma kuantitatif menekankan pada prosedur pengukuran yang bersifat objektif, koleksi data yang terorganisir dan terstruktur, serta implementasi metode analisis statistik guna memverifikasi hipotesis atau mengartikulasikan sebuah fenomena secara ilmiah (Damanik et al., 2025).

C. Setting Penelitian

Studi ini diselenggarakan di Eks Karesidenan Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, mencakup 5 kabupaten dan 2 kota dengan periode observasi dari tahun 2019 hingga 2025. Tipe data yang dipergunakan ialah data sekunder, yang diperoleh dari institusi resmi yaitu BPS dan BAZNAS, relevan dengan parameter penelitian.

D. Populasi dan sampel

Populasi dalam studi ini mencakup keseluruhan data yang terkait dengan variabel studi di eks karesidenan pekalongan, yakni angka pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia, penyaluran dana zakat, dan tingkat kemiskinan. Sumber data berasal dari publikasi resmi lembaga pemerintah, khususnya BPS dan BAZNAS. Sampel penelitian menggunakan populasi yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 Kota dalam kurun waktu 7 tahun, sehingga didapat populasi sebanyak 49.

E. Variabel Penelitian

Variabel studi merujuk pada semua entitas atau atribut yang ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi dan dievaluasi secara mendalam, dengan tujuan memperoleh wawasan yang menunjang proses inferensi. Dalam konteks studi ini enam variabel diidentifikasi sebagai fokus sentral observasi dan analisis, yang terdiri atas satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan (Y), yang kemudian ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln Y$).

Adapun variabel independen meliputi tingkat pengangguran terbuka (X_1), tingkat partisipasi angkatan kerja (X_2), upah minimum (X_3), indeks pembangunan manusia (X_4), dan penyaluran dana zakat (X_5). Seluruh variabel independen tersebut juga ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural, masing-masing menjadi $\ln_X_1$, $\ln_X_2$, $\ln_X_3$, $\ln_X_4$, dan $\ln_X_5$.

Tabel 3. 1 Definisi Variabel Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Tingkat Kemiskinan (Y)	Kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan primer kehidupan, termasuk pakaian, makanan, dan tempat tinggal (Madaliyah & Rohmah, 2024).	$p_a = \sum_{i=1}^p \left[\frac{z - y_i}{z} \right] a$ <p>Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)</p>	Rasio
Tingkat Pengangguran Terbuka (X_1)	Menggambarkan individu yang sehat, memiliki kapasitas kerja, dan termasuk dalam angkatan kerja, namun tidak memiliki pekerjaan dan belum memperoleh pendapatan. (Afriansyah et al., 2026).	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <p>Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)</p>	Rasio
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_2)	Rasio ini menunjukkan persentase angkatan kerja (individu yang bekerja atau aktif mencari pekerjaan) terhadap keseluruhan	$TPAK = \frac{PYB}{PUK} \times 100\%$ <p>Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)</p>	Rasio

	populasi usia kerja (umumnya 15 tahun ke atas).(Telisa Aulia Falianty, 2019)		
Upah Minimum (X3)	Upah minimum adalah tarif terendah yang ditetapkan sebagai patokan bagi entitas bisnis atau pemberi kerja saat membayarkan kompensasi kepada para karyawan (Josua Ferdinand et al., 2024).	$UM_n = UM_t + UM_t x (Inflasi + PertumbuhanPDB)$ <p>Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)</p>	Rasio
Indeks Pembangunan Manusia (X4)	Berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi tingkat kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia (Nizhamul et al., 2023)	$IPM = \sqrt[3]{1_{kesehatan} x 1_{pendidikan} x 1_{pengeluaran} x 100}$ <p>Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022)</p>	Interval
Penyaluran dana zakat (X5)	Proses pendistribusian dana yang telah dihimpun dari muzakki (orang yang membayar zakat) kepada mustahik (pihak yang berhak menerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sumber : (Raihan Al Kuwaity Putra Muttaqin, 2022)	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Sumber : (Wawancara Baznas Kabupaten Batang, 2026)	Rasio

F. Sumber Data

Studi ini memanfaatkan data sekunder sebagai fondasi datanya. Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung, melalui perantara atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Secara

umum jenis data ini mencakup dokumen, arsip, publikasi, atau laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian (Sudaryana & H. R. Ricky Agusiady, 2022). Data sekunder yang diintegrasikan dalam studi ini mencakup informasi terkait tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia, penyaluran dana zakat, dan angka kemiskinan. Sumber perolehan data ini adalah publikasi resmi dari BPS dan BAZNAS.

G. Teknik Pengumpulan Data

Proses penghimpunan data dilaksanakan menggunakan metode dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai bahan tertulis, arsip, dan dokumen yang relevan dengan subjek dan variabel penelitian, untuk kemudian menjadi objek studi dan analisis lebih lanjut.

H. Metode Analisis Data

Tahapan ini dilaksanakan setelah seluruh informasi dari para partisipan dan sumber relevan lainnya telah berhasil diperoleh. Dalam fase ini data diorganisir dan dikategorikan berdasarkan variabel serta atribut partisipan. Selanjutnya, data tersebut ditabulasikan untuk memfasilitasi proses analisis. Kemudian, penyajian data dilakukan berdasarkan variabel penelitian guna menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan. Selain itu, pengolahan dan kalkulasi data juga dilaksanakan untuk memverifikasi hipotesis penelitian, jika penelitian tersebut memang melibatkan hipotesis. Namun untuk penelitian yang tidak mencakup hipotesis, tahap pengujian hipotesis tidak diterapkan (Sugiyono, 2013). Pendekatan analisis data yang dipilih untuk penelitian ini

adalah kuantitatif yang berlandaskan ekonometrika, yang berarti pemanfaatan model statistik untuk menganalisis serta mengukur dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan transformasi logaritma natural ($\ln$), yang dilakukan sebelum data diolah menggunakan software EViews. Transformasi ini dipilih karena transformasi adalah upaya untuk mengubah skala pengukuran atau bentuk hubungan regresi agar sesuai dengan pola data yang dianalisis. Melalui diagram pencar (scatter plot), peneliti dapat mengamati pola hubungan antarvariabel dan menentukan bentuk fungsi yang sesuai dengan data. Transformasi dapat dilakukan apabila model regresi linear tidak memenuhi asumsi regresi atau bentuk hubungan antarvariabel belum sesuai dengan model yang digunakan. Dalam hal ini transformasi dapat diterapkan pada variabel independen maupun variabel dependen, bergantung pada tujuan dan karakteristik data penelitian (Muh. Saleh Mire, 2019).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Sebuah metode analisis yang diaplikasikan untuk memaparkan atau menjelaskan atribut-atribut dari suatu kumpulan data melalui representasi informasi seperti nilai rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, standar deviasi, serta metrik statistik lainnya. Analisis semacam ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi data, sehingga memfasilitasi peneliti dalam mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik data yang sedang dikaji (Sumbodo et al., 2024).

2. Pemilihan model analisis data panel

a. *Common Effect Model*

Merupakan kerangka kerja paling fundamental dalam analisis data panel. Model ini mengolah seluruh observasi secara homogen, tanpa membedakan entitas individual maupun periode waktu, dengan asumsi bahwa karakteristik antarindividu bersifat konstan seiring berjalannya waktu. Prosedur ini melibatkan penggabungan data deret waktu dan data potong lintang, kemudian estimasi koefisien dilakukan menggunakan *metode pooled least square* (Basuki, 2014).

b. *Fixed Effect Model*

Diasumsikan terdapat heterogenitas di antara individu, yang direpresentasikan oleh intersep yang bervariasi. Oleh karena itu, intersep untuk setiap individu dianggap sebagai parameter yang tidak diketahui dan diestimasi dengan memanfaatkan *variabel dummy*.

c. *Random Effect Model*

Memandang efek individu sebagai bagian dari galat yang bersifat acak, sehingga tidak diperlakukan sebagai parameter tetap seperti dalam fixed effects model. Syarat utamanya, efek tersebut tidak boleh berkorelasi dengan variabel prediktor yang teramati. Model ini juga dikenal sebagai model komponen galat (ECM) karena residunya terdiri dari beberapa bagian. (Basuki, 2014).

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengidentifikasi apakah Model Efek

Umum (CEM) atau Model Efek Tetap (FEM) yang lebih tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini. Hipotesis yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:(Nani, 2022)

- 1) H_0 = Model CEM yang diterima apabila nilai probabilitas Chi-square $> 0,05$
- 2) H_1 = Model FEM yang diterima apabila probabilitas Chi-square $< 0,05$

b. Uji Hausman

Setelah estimasi model efek tetap (FEM) berhasil diselesaikan, langkah berikutnya adalah melaksanakan uji Hausman. Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah model efek tetap (FEM) atau model efek acak (REM) yang lebih tepat untuk diterapkan dalam analisis penelitian. Hipotesis yang mendasari uji Hausman adalah sebagai berikut: (Anwar & Nursan, 2025).

- 1) H_0 = Model REM yang diterima apabila nilai probabilitas Chi-square $> 0,05$
- 2) H_1 = Model FEM yang diterima apabila nilai probabilitas Chi-square $< 0,05$

c. Uji *Langrange Multiplier*

Pengujian untuk menetapkan model terbaik diantara CEM dan REM pada pengujian regresi data

panel, hipotesisnya yaitu (Nani, 2022).

1) H_0 = Model CEM yang diterima apabila nilai prob Breusch Pagan $> 0,05$

2) H_1 = Model REM yang diterima apabila nilai prob Breusch Pagan $< 0,05$

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilaksanakan untuk menentukan apakah residual dalam model penelitian mengikuti distribusi normal. Dalam konteks analisis data panel normalitas data dapat dinilai melalui statistik deskriptif menggunakan nilai probabilitas. Data dianggap terdistribusi secara normal apabila nilai probabilitasnya melampaui 0,05 (Ghozali & Dwi Ratmono, 2017).

b. Uji Multikolinearitas

Langkah ini dilaksanakan untuk menentukan adanya keterkaitan atau korespondensi yang substansial di antara faktor-faktor independen dalam suatu struktur penelitian. Apabila terdapat korelasi yang kuat di antara variabel-variabel bebas, hal ini dapat berimplikasi pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang berujung pada perolehan hasil analisis yang suboptimal. Dalam kerangka pengujian, sebuah model dianggap terbebas dari multikolinearitas jika nilai korelasi di antara keseluruhan variabel

independen berada di bawah 0,80 (Kusumaningtyas et al., 2022)

c. Uji Heteroskedastisitas

Mengevaluasi adanya perbedaan varians pada residual atau galat dalam model regresi. Salah satu pendekatan yang dapat diadopsi adalah uji Glejser. Sebuah model regresi dianggap tidak mengalami heteroskedastisitas jika nilai Prob. Chi-Square yang dihasilkan melebihi 0,05 (Kusumaningtyas et al., 2022).

d. Uji Autokorelasi

Pemeriksaan yang dilaksanakan guna menentukan keberadaan atau ketiadaan korelasi antara residual pada satu masa dan residual pada masa sebelumnya. Dalam konteks model regresi, relasi antara variabel independen dan variabel dependen dapat dianalisis secara memadai apabila tidak terdapat korelasi di antara data observasi dari periode waktu yang berbeda (Ghozali & Dwi Ratmono, 2017).

Merujuk pada pendapat Basuki yang dikutip dari Awaludin et al., (2023), penggunaan data panel membuat uji autokorelasi tidak perlu dilakukan, sebab masalah autokorelasi hanya relevan untuk data *time series*, bukan *cross section*.

5. Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan teknik analisis yang menggabungkan data *cross section* dengan data *time series*. Data *cross section* digunakan untuk menggambarkan beberapa objek atau unit

penelitian pada periode tertentu, sedangkan data *time series* menunjukkan perkembangan data dari satu periode ke periode berikutnya. Penggabungan kedua jenis data tersebut memungkinkan penelitian dilakukan terhadap beberapa objek dalam kurun waktu tertentu secara bersamaan (Madany & Rais, 2022). Bentuk umum regresi data panel sebagai berikut:

$$Y_{\{it\}} = a + \beta_1 X_{\{1,it\}} + \beta_2 X_{\{2,it\}} + \beta_3 X_{\{3,it\}} + \beta_4 X_{\{4,it\}} + \beta_5 X_{\{5,it\}} + \varepsilon_{\{it\}}$$

$Y_{\{it\}}$ = Nilai variabel terikat

a = Konstanta.

X_{1it} = Variabel bebas

$\varepsilon_{\{it\}}$ = Residual

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel X_1, X_2, X_3, X_4, X_5

6. Uji Signifikansi

a. Uji Parsial (Uji t)

Dalam kerangka sebuah studi, pengujian signifikansi parsial diaplikasikan untuk mengevaluasi hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian ini secara umum dikenal sebagai uji-t, sebuah metode yang diterapkan untuk mengamati dampak masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen, serta untuk menentukan apakah dampak tersebut signifikan. Jika nilai Prob berada di bawah ambang batas 0,05, maka variabel independen tersebut dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Anwar & Nursan, 2025).

b. Uji Simultan (Uji F)

Mengidentifikasi apakah variabel-variabel independen secara kolektif memberikan dampak terhadap variabel dependen. Keputusan statistik ditetapkan berdasarkan tingkat signifikansi dan statistik uji F. Hipotesis nol (H_0) akan ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F-hitung melebihi nilai F-tabel (Hutagalung & Darnius, 2022).

c. Koefisien Determinasi

Disimbolkan sebagai R kuadrat (R^2), berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kapasitas model dalam menjelaskan variabilitas variabel yang sedang dipelajari. Rentang nilai R^2 adalah dari 0 hingga 1. Model dianggap superior dalam kemampuan prediktifnya apabila nilai R^2 lebih tinggi atau mendekati 1 (Anwar & Nursan, 2025).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berisi laporan tahunan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan penyaluran dana zakat selama periode tahun 2019 sampai 2025. Objek penelitian meliputi seluruh kabupaten dan kota di Eks Karesidenan Pekalongan yang berjumlah 7 daerah, yang terdiri atas 5 kabupaten (Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) dan 2 kota (Kota Pekalongan dan Kota Tegal).

Metode yang digunakan adalah data panel, dengan variabel diantaranya:

1. Variabel dependen (Y)

Tingkat kemiskinan dipilih sebagai variabel terikat (dependen) pada penelitian ini, dengan indikator berupa persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (P0) terhadap total jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan. Data tingkat kemiskinan diukur dalam satuan persen (%). Semakin tinggi persentase tingkat kemiskinan menunjukkan semakin besar proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, sandang, dan papan), sehingga mengindikasikan

semakin buruknya kondisi kesejahteraan ekonomi di suatu daerah. Berikut data yang akan digunakan untuk pennelitian:

Tabel 4. 1 Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan
Pekalongan 2019 – 2025

Tahun	Nama Kabupaten/Kota	Tingkat Kemiskinan (persen)
2019	Kota Pekalongan	6.60
2020		7.17
2021		7.59
2022		7.00
2023		6.81
2024		6.71
2025		6.14
2019	Kabupaten Pekalongan	9.71
2020		10.19
2021		10.57
2022		9.67
2023		9.67
2024		8.95
2025		8.05
2019	Kabupaten Batang	8.35
2020		9.13
2021		9.68
2022		8.98
2023		8.92
2024		8.73
2025		7.79
2019	Kabupaten Pemalang	15.41
2020		16.06
2021		16.56
2022		15.06
2023		15.03
2024		14.92
2025		13.32
2019	Kota Tegal	7.74
2020		7.80
2021		8.12
2022		7.91
2023		7.68
2024		7.64
2025		7.28

2019	Kabupaten Tegal	7.64
2020		8.14
2021		8.60
2022		7.90
2023		7.30
2024		6.81
2025		6.16
2019	Kabupaten Brebes	16.22
2020		17.03
2021		17.43
2022		16.06
2023		15.78
2024		15.60
2025		14.15

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

2. Variabel independen (X)

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja, namun tidak memiliki pekerjaan dan belum memperoleh penghasilan. TPT diproksikan menggunakan perbandingan antara jumlah penduduk yang menganggur dengan total angkatan kerja yang berlaku pada masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan. Variabel ini diukur dalam satuan persen (%). Tingginya tingkat pengangguran terbuka diduga dapat menurunkan pendapatan masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Berikut data yang akan digunakan untuk penelitian:

Tabel 4. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka di Eks Karesidenan
Pekalongan 2019 – 2025

Tahun	Nama Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
2019	Kota Pekalongan	5.80
2020		7.02
2021		6.89
2022		4.98
2023		5.02
2024		4.91
2025		4.83
2019	Kabupaten Pekalongan	5.80
2020		7.02
2021		6.89
2022		4.98
2023		5.02
2024		4.91
2025		4.83
2019	Kabupaten Batang	4.11
2020		6.92
2021		6.59
2022		6.64
2023		6.06
2024		5.67
2025		5.07
2019	Kabupaten Pemalang	6.45
2020		7.64
2021		6.71
2022		6.63
2023		6.55
2024		6.63
2025		6.61
2019	Kota Tegal	8.08
2020		8.40
2021		8.25
2022		6.68
2023		6.05
2024		5.88
2025		5.82
2019	Kabupaten Tegal	8.12
2020		9.82
2021		9.97
2022		9.64

2023	Kabupaten Brebes	8.60
2024		7.53
2025		7.61
2019		7.39
2020		9.83
2021		9.78
2022		9.48
2023		8.98
2024		8.35
2025		8.07

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berfungsi sebagai mekanisme untuk menilai proporsi penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Penilaian ini mempertimbangkan penduduk yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk usia kerja pada masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan. TPAK diukur dalam satuan persen (%), pada skala yang berkisar antara 0 hingga 100. Skor yang tinggi menandakan besarnya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi, sedangkan skor yang rendah menunjukkan adanya wilayah dengan potensi tenaga kerja yang belum dimanfaatkan secara optimal. Berikut data yang dibutuhkan dalam penelitian:

Tabel 4. 3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Eks Karesidenan Pekalongan 2019 – 2025

Tahun	Nama Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
-------	---------------------	---------------------------------------

2019	Kota Pekalongan	72.46
2020		66.45
2021		75.77
2022		70.35
2023		73.95
2024		76.06
2025		75.34
2019	Kabupaten Pekalongan	71.15
2020		71.23
2021		71.46
2022		70.40
2023		70.46
2024		76.38
2025		77.27
2019	Kabupaten Batang	68.75
2020		69.78
2021		71.40
2022		74.90
2023		76.62
2024		77.91
2025		77.81
2019	Kabupaten Pemalang	66.27
2020		66.57
2021		65.90
2022		69.91
2023		69.58
2024		72.24
2025		71.97
2019	Kota Tegal	69.61
2020		64.57
2021		68.25
2022		68.60
2023		66.64
2024		69.61
2025		72.01
2019	Kabupaten Tegal	66.50
2020		66.52
2021		66.24
2022		65.54
2023		67.61
2024		73.49
2025		68.80
2019	Kabupaten Brebes	66.08
2020		66.65

2021	63.97
2022	66.01
2023	66.10
2024	71.92
2025	71.90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

c. Upah Minimum (X3)

Standar upah terendah yang ditetapkan sebagai acuan bagi perusahaan atau pemberi kerja dalam memberikan pembayaran kepada para pekerja dapat diukur dan dinilai melalui suatu indikator yang dikenal sebagai Upah Minimum, yang diproksikan menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan. Upah Minimum diukur dalam satuan rupiah (Rp), di mana angka yang lebih tinggi mengindikasikan standar perlindungan upah yang lebih baik bagi pekerja di suatu wilayah, sementara angka yang lebih rendah menunjukkan tingkat jaring pengaman upah yang masih relatif rendah di pasar tenaga kerja. Data berikut akan digunakan untuk analisis ini:

Tabel 4. 4 Upah Minimum di Eks Karesidenan Pekalongan
2019 – 2025

Tahun	Nama Kabupaten/Kota	Upah Minimum
2019	Kota Pekalongan	Rp1.906.922.47
2020		Rp2.072.000.00
2021		Rp2.139754.00
2022		Rp2.156213.77
2023		Rp2.305.822.66
2024		Rp2.389.801.00
2025		Rp2.545.138.00

2019	Kabupaten Pekalongan	Rp 1859885.05
2020		Rp 2018161.00
2021		Rp 2084155.14
2022		Rp 2094646.19
2023		Rp 2247345.90
2024		Rp 2334886.00
2025		Rp 2486653.59
2019	Kabupaten Batang	Rp 1900000.00
2020		Rp 2061700.00
2021		Rp 2129117.00
2022		Rp 2132535.02
2023		Rp 2282025.72
2024		Rp 2379702.00
2025		Rp 2534382.00
2019	Kabupaten Pemalang	Rp 1718000.00
2020		Rp 1865000.00
2021		Rp 1926000.00
2022		Rp 1940890.41
2023		Rp 2081783.00
2024		Rp 2156000.00
2025		Rp 2296140.00
2019	Kota Tegal	Rp 1762000.00
2020		Rp 1925000.00
2021		Rp 1982750.00
2022		Rp 2005930.52
2023		Rp 2145012.11
2024		Rp 2231628.00
2025		Rp 2376683.82
2019	Kabupaten Tegal	Rp 1747000.00
2020		Rp 1896000.00
2021		Rp 1958000.00
2022		Rp 1968446.34
2023		Rp 2106237.58
2024		Rp 2191161.00
2025		Rp 2333586.46
2019	Kabupaten Brebes	Rp 1665850.00
2020		Rp 1807614.00
2021		Rp 1866722.90
2022		Rp 1885019.39
2023		Rp 2018836.92
2024		Rp 2103100.00
2025		Rp 2239801.50

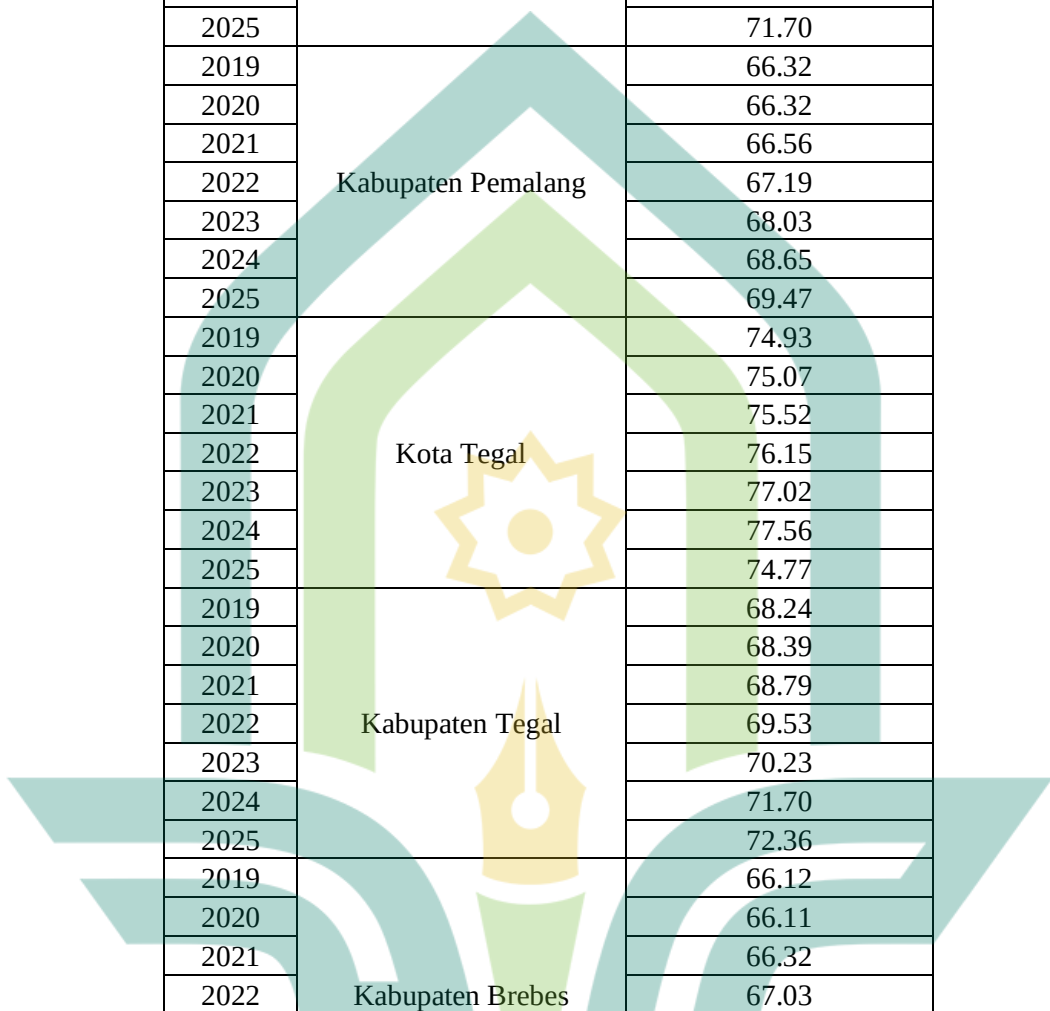
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

d. Indeks Pembangunan Manusia (X4)

Tingkat kemajuan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah dapat diukur dan dinilai melalui suatu indikator yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita, pada masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan. IPM diukur pada skala 0 hingga 100, di mana angka yang lebih tinggi mengindikasikan capaian pembangunan manusia yang lebih baik, sementara angka yang lebih rendah menunjukkan wilayah yang masih memerlukan peningkatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusianya. Berikut data yang dibutuhkan dalam penelitian:

Tabel 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Eks Karesidenan Pekalongan 2019 – 2025

Tahun	Nama Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia
2019	Kota Pekalongan	74.77
2020		74.98
2021		75.46
2022		75.90
2023		76.71
2024		77.21
2025		77.95
2019	Kabupaten Pekalongan	69.71
2020		69.63
2021		70.11
2022		70.81
2023		71.40
2024		71.95
2025		72.71
2019	Kabupaten Batang	68.42
2020		68.65



2021		68.92
2022		69.45
2023		70.20
2024		70.73
2025		71.70
2019	Kabupaten Pemalang	66.32
2020		66.32
2021		66.56
2022		67.19
2023		68.03
2024		68.65
2025		69.47
2019	Kota Tegal	74.93
2020		75.07
2021		75.52
2022		76.15
2023		77.02
2024		77.56
2025		74.77
2019	Kabupaten Tegal	68.24
2020		68.39
2021		68.79
2022		69.53
2023		70.23
2024		71.70
2025		72.36
2019	Kabupaten Brebes	66.12
2020		66.11
2021		66.32
2022		67.03
2023		67.95
2024		70.18
2025		71.18

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

e. Penyaluran Dana Zakat (X5)

Jumlah dana kewajiban finansial yang disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dapat diukur dan dinilai melalui suatu indikator yang dikenal sebagai Penyaluran Zakat, yaitu total dana zakat yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh lembaga

pengelola zakat (BAZNAS) pada masing-masing kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan. Penyaluran dana Zakat diukur dalam satuan rupiah (Rp), di mana angka yang lebih tinggi mengindikasikan besarnya dana yang tersalurkan untuk membantu masyarakat kurang mampu, sementara angka yang lebih rendah menunjukkan masih terbatasnya jangkauan penyaluran dana zakat di suatu wilayah. Berikut data yang dibutuhkan dalam penelitian:

Tabel 4. 6 Penyaluran Dana Zakat di Eks Karesidenan Pekalongan
2019 – 2025

Tahun	Nama Kabupaten/Kota	Distribusi Zakat
2019	Kota Pekalongan	Rp974,159,931.00
2020		Rp1,403,861,877.00
2021		Rp1,470,899,300.00
2022		Rp2,727,789,985.00
2023		Rp2,668,027,828.00
2024		Rp1,772,063,030.00
2025		Rp1,849,130,700.00
2019	Kabupaten Pekalongan	Rp780,176,091.00
2020		Rp2,691,160,000.00
2021		Rp1,921,755,882.00
2022		Rp1,768,019,226.00
2023		Rp4,147,653,444.00
2024		Rp1,533,586,204.00
2025		Rp1,912,293,591.00
2019	Kabupaten Batang	Rp2,043,845,055.00
2020		Rp536,033,000.00
2021		Rp542,840,619.00
2022		Rp1,391,959,629.00
2023		Rp2,556,733,500.00
2024		Rp1,205,929,534.00
2025		Rp855,446,610.00
2019	Kabupaten Pemasang	Rp7,831,960,305.00
2020		Rp4,974,138,342.00
2021		Rp7,982,535,800.00
2022		Rp6,717,212,700.00
2023		Rp7,278,001,000.00

2024	Kota Tegal	Rp8,224,663,600.00
2025		Rp3,461,479,205.00
2019		Rp751.125.000.00
2020		Rp899.439.877.00
2021		Rp738,958,124.00
2022	Kabupaten Tegal	Rp1,095,106,870.00
2023		Rp1,231,847,720.00
2024		Rp1,764,839,071.00
2025		Rp1,569,130,092.00
2019		Rp257,310,000.00
2020	Kabupaten Brebes	Rp1,208,840,020.00
2021		Rp3,326,805,852.00
2022		Rp3,219,117,882.00
2023		Rp3,306,106,118.00
2024		Rp3,354,260,312.00
2025		Rp7,095,583,826.00
2019		Rp3,125,870,126.00
2020		Rp2,095,323,995.00
2021		Rp3,444,402,343.00
2022		Rp3,500,436,788.00
2023		Rp5,096,424,356.00
2024		Rp7,520,518,290.00
2025		Rp5,444,971,920.00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

B. Deskripsi Objek Penelitian

Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	X5	Y
Mean	1.910350	4.251411	14.54602	4.263207	21.49867	2.270989
Median	1.899118	4.247209	14.54987	4.251348	21.43810	2.166765
Maximum	2.299581	4.355554	14.74970	4.356068	22.83040	2.858193
Minimum	1.413423	4.158414	14.32585	4.191320	19.36579	1.814825
Std. Dev.	0.228273	0.054003	0.103054	0.049637	0.811665	0.327789
Skewness	-0.053632	0.302421	-0.002440	0.342243	-0.216204	0.583284
Kurtosis	2.190907	2.084175	2.382486	1.921538	2,617680	1.869121
Jarque-Bera	1.360029	2.459329	0.778584	3.331183	0.680172	5.389523
Probabilit y	0.506610	0.292391	0.677537	0.189079	0.711709	0.067559

Sum	93.60717	208.3192	712.7550	208.8971	1053.435	111.2784
Sum Sq. Dev.	2.501201	0.139983	0.509763	0.118266	31.62243	5.157378
Observations	49	49	49	49	49	49

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil tersebut diketahui variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025 memiliki rata-rata sebesar 6.92 persen dengan nilai tengah sebesar 6.68 persen. Adapun nilai Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi yaitu sebesar 9.97 persen yang terjadi di Kabupaten Tegal tahun 2021, sedangkan nilai terendahnya yaitu 4,11 persen yang terjadi Kabupaten Batang tahun 2019. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat jarak pada Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi dengan terendah, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan Tingkat Pengangguran Terbuka antar Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2) di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025 memiliki rata-rata sebesar 70.30 persen dengan nilai tengah sebesar 69.91 persen Adapun nilai tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi yaitu sebesar 77.91 persen yang berada di wilayah Kabupaten Batang pada tahun 2024, sedangkan nilai terendahnya yaitu sebesar 63.97 persen berada di wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2021. Dari hasil tersebut dapat diketahui terdapat jarak nilai tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi dengan terendah, sehingga hal ini menunjukkan adanya ketimpangan tingkat partisipasi angkatan kerja antar Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

Variabel Upah Minimum (X3) di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025 memiliki rata-rata sebesar Rp2.086.960 dengan nilai tengah sebesar Rp2.084.155. Adapun nilai upah minimum tertinggi yaitu sebesar Rp2.545.138 yang diduduki oleh wilayah Kota Pekalongan pada tahun 2025, sedangkan nilai terendahnya yaitu sebesar Rp1.665.850 yang diduduki oleh wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2019. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat jarak antara nilai upah minimum tertinggi dengan terendah, sehingga hal ini menunjukkan adanya ketimpangan upah minimum antar Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X4) di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025 memiliki rata-rata sebesar 71.12 persen dengan nilai tengah sebesar 70.20 persen. Adapun nilai indeks pembangunan manusia tertinggi yaitu sebesar 77.95 persen yang diduduki oleh wilayah Kota Pekalongan pada tahun 2025, sedangkan nilai terendahnya yaitu sebesar 66.11 persen yang diduduki oleh wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat jarak antara nilai indeks pembangunan manusia tertinggi dengan terendah, sehingga hal ini menunjukkan adanya ketimpangan indeks pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

Variabel Penyaluran dana Zakat (X5) di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025 memiliki rata-rata sebesar Rp2.920.000.000 dengan nilai tengah sebesar Rp2.043.845.055. Adapun nilai upah minimum tertinggi yaitu sebesar Rp8.224.663.600 yang diduduki oleh wilayah Kabupaten Pemalang

pada tahun 2024, sedangkan nilai terendahnya yaitu sebesar Rp257.310.000 yang diduduki oleh wilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2019. Dari hasil tersebut diketahui bahwa terdapat jarak antara nilai penyaluran dana zakat tertinggi dengan terendah, sehingga hal ini menunjukkan adanya ketimpangan penyaluran dana zakat antar Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

Variabel Tingkat Kemiskinan (Y) di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025 memiliki rata-rata sebesar 10.24 persen dengan nilai tengah sebesar 8.73 persen. Nilai tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 17.43 persen yang terjadi di wilayah Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Sedangkan nilai terendahnya yaitu sebesar 6.14 persen yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan pada tahun 2025. Dari nilai tersebut diketahui bahwa persentase tingkat kemiskinan tertinggi dengan terendah memiliki jarak yang cukup besar, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan laju tingkat kemiskinan antar Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Pekalongan.

C. Analisis Data Panel

Pemantauan sejumlah besar subjek selama periode waktu tertentu memungkinkan diperolehnya wawasan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan format data alternatif. Karakteristik inilah yang menjadi ciri khas data panel, yakni kumpulan informasi yang menggabungkan pengamatan *time series* dan *cross section*.

1. Model Regresi Data Panel

Terdapat tiga metode utama yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi model regresi pada data panel:

a. *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model (CEM) adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan data dari berbagai unit pengamatan sepanjang waktu, tanpa memperhitungkan perbedaan karakteristik antar unit atau periode waktu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seluruh unit observasi berbagi nilai *intercept* yang sama.

Tabel 4. 8 Uji Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	21.62741	4.923229	4.392931	0.0001
LN_X1	0.040987	0.162432	0.252336	0.8020
LN_X2	0.469605	0.895243	0.524555	0.6026
LN_X3	-0.656590	0.479284	-1.369939	0.1778
LN_X4	-3.553709	0.754091	-4.712575	0.0000
LN_X5	0.152091	0.039750	3.826187	0.0004

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil model CEM diatas didapatkan sebagai berikut:

$$Y_{\{it\}} = 21.62741 + 0.220216X_{\{1,it\}} + 0.040987X_{\{2,it\}} - 0.656590X_{\{3,it\}} - 3.553709X_{\{4,it\}} + 0.152091X_{\{5,it\}} + \varepsilon_{\{it\}}$$

Persamaan diatas diketahui nilai koefisien kemiskinan sebesar 21.62741. Koefisien tingkat pengangguran terbuka (X1) bernilai 0.040987, artinya setiap bertambahnya tingkat pengangguran terbuka sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.040987. Koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) sebesar 0.469605, artinya setiap tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.469605. Koefisien upah minimum (X3)

adalah -0.656590, yang berarti bahwa kemiskinan dapat menurun dengan nilai -0.656590 jika upah minimum naik sebesar satu satuan. Koefisien indeks pembangunan manusia (X4) sebesar -3.553709, yang berarti bahwa kemiskinan dapat menurun dengan nilai -3.553709 jika indeks pembangunan manusia naik sebesar satu satuan. Koefisien penyaluran dana zakat (X5) sebesar 0.152091, artinya setiap penyaluran dana zakat naik sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.152091.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model (FEM) didefinisikan sebagai model yang berasumsi bahwa masing-masing unit pengamatan mempunyai ciri khas tersendiri yang dapat memberi dampak terhadap variabel dependen. Perbedaan tersebut diakomodasi melalui variasi nilai intersep antar individu yang dianggap tetap dalam periode waktu tertentu pada model ini.

Tabel 4. 9 Uji Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.95322	1.899427	5.766591	0.0000
LN_X1	0.220016	0.055821	3.941474	0.0003
LN_X2	-0.103063	0.246076	-0.418826	0.6778
LN_X3	-0.023016	0.147693	-0.155834	0.8770
LN_X4	-2.056092	0.752569	-2.732098	0.0096
LN_X5	0.020278	0.014229	1.425099	0.1625

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil model FEM diatas didapatkan sebagai berikut:

$$Y_{\{it\}} = 10.9532241 + 0.220016X_{\{1,it\}} + 0.0103063X_{\{2,it\}} \\ - 0.023016X_{\{3,it\}} - 2.056092X_{\{4,it\}} \\ + 0.020278X_{\{5,it\}} + \varepsilon_{\{it\}}$$

Persamaan diatas diketahui nilai koefisien kemiskinan sebesar 10.95322. Koefisien tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar 0.220016, artinya setiap bertambahnya tingkat pengangguran terbuka sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.220016. Koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) sebesar -0.0103063, artinya setiap tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar satu satuan maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.0103063. Koefisien upah minimum (X3) adalah -0.023016, artinya setiap upah minimum sebesar satu satuan maka akan menurunkan kemiskinan sebesar -0.023016. Koefisien indeks pembangunan manusia (X4) sebesar -2.056092, yang berarti bahwa kemiskinan dapat menurun dengan nilai -2.056092 jika indeks pembangunan manusia naik sebesar satu satuan. Koefisien penyaluran dana zakat (X5) sebesar 0.020278, artinya setiap penyaluran dana zakat naik sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.020278.

c. *Random Effect Model (REM)*

Random Effect Model (REM) merupakan suatu model yang mempertimbangkan adanya hubungan antarikorelasi dalam

komponen error variance. Implementasi model ini berpotensi menyebabkan berkurangnya tingkat kebebasan, yang dapat berdampak pada penurunan efisiensi estimasi parameter.

Tabel 4. 10 Uji Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.10422	1.200175	16.75107	0.0000
LN_X1	0.087100	0.041219	2.113117	0.0404
LN_X2	0.391310	0.216519	1.807278	0.0777
LN_X3	-0.455061	0.117055	-3.887595	0.0003
LN_X4	-3.721466	0.207433	-17.94054	0.0000
LN_X5	0.131239	0.010221	12.84061	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Pada data REM diatas didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 20.10422 + 0.087100X_{1,it} + 0.391310X_{2,it} - 0.455061X_{3,it} - 3.721466X_{4,it} + 0.131239X_{5,it} + \varepsilon_{it}$$

Persamaan diatas diketahui nilai koefisien kemiskinan sebesar 20.10422. Koefisien tingkat pengangguran terbuka (X1) sebesar 0.087100, artinya setiap bertambahnya tingkat pengangguran terbuka sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.087100. Koefisien tingkat partisipasi angkatan kerja (X2) sebesar 0.391310, artinya setiap tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.391310. Koefisien upah minimum (X3) adalah -0.455061, yang berarti bahwa kemiskinan dapat menurun dengan nilai -0.455061 jika upah minimum naik sebesar satu satuan. Koefisien indeks pembangunan manusia (X4) sebesar -3.721466, yang berarti bahwa

kemiskinan dapat menurun dengan nilai -3.721466 jika indeks pembangunan manusia naik sebesar satu satuan. Koefisien penyaluran dana zakat (X5) sebesar 0.131239, artinya setiap penyaluran dana zakat naik sebesar satu satuan maka kemiskinan dapat meningkat sebesar 0.131239.

2. Penentuan Model Regresi

Proses penentuan model dilakukan melalui beberapa uji statistic yang tepat dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu:

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memastikan apakah Model (CEM) atau Model (FEM) lebih sesuai.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	119.777471	(6,37)	0.0000
Cross-section Chi-square	147.817321	6	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan, nilai Prob Cross-Section F sebesar $0,0000 < 0,05$ maka terpilih model Fixed Effect Model (FEM).

b. Uji Hausman

Uji Hausman berfungsi untuk mengevaluasi dan memilih antara model efek tetap (FEM) dan model efek acak (REM).

Tabel 4. 12 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	524.904219	5	0.0000

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

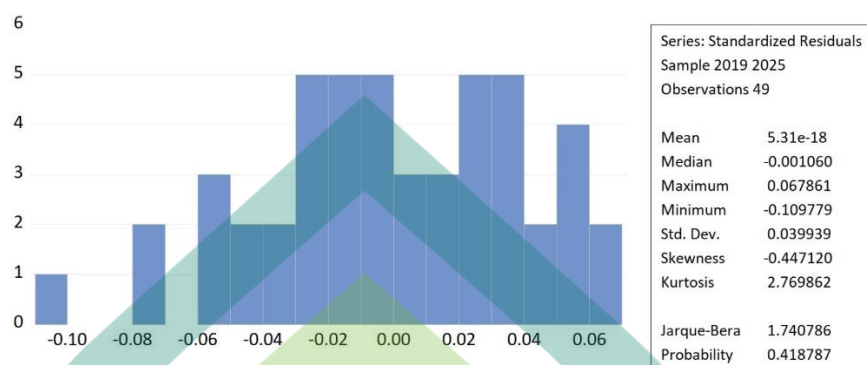
Analisis yang dilakukan menghasilkan nilai p sebesar 0,0000 untuk F cross-section. Karena nilai yang diamati ini berada di bawah tingkat signifikansi (α) yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 0,05, maka *Fixed Effect Model* (FEM) dianggap sebagai pendekatan statistik yang tepat.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah data residual dalam model mengikuti distribusi normal. Kriteria pengujian ini diambil berdasarkan nilai probabilitas Jarque-Bera (JB), di mana data residual dinyatakan terdistribusi secara normal apabila nilai probabilitas yang diperoleh menunjukkan angka melebihi 0,05.

Tabel 4. 13 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai Jarque-Bera yang teramati adalah 1.740786 dengan probabilitas 0,418787. Mengingat probabilitas ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. Penelitian ini menggunakan 49 sampel data, yang masuk dalam kategori sampel besar karena jumlahnya melebihi 30 data.

b. Uji Multikolienaritas

Tujuan dari penilaian multikolinearitas ini adalah untuk memastikan adanya hubungan yang signifikan di antara variabel-variabel prediktor. Penilaian ini mampu mengidentifikasi indikasi multikolinearitas apabila nilai R^2 yang dihitung melebihi 0,80, yang menandakan adanya multikolinearitas dalam model tersebut.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Multtikolienaritas

	LN_X1	LN_X2	LN_X3	LN_X4	LN_X5
LN_X1	1.000000	-0.641041	-0.543176	-0.421411	0.130288
LN_X2	-0.641041	1.000000	0.751911	0.380302	-0.150206
LN_X3	-0.543176	0.751911	1.000000	0.523377	0.025352
LN_X4	-0.421411	0.380302	0.523377	1.000000	-0.366948
LN_X5	0.130288	-0.150206	0.025352	-0.366948	1.000000

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, korelasi antara X1 dan X2 sebesar -0.641041, X1 dan X3 sebesar -0.543176, X1 dan X4 sebesar -0.421411, serta X1 dan X5 sebesar 0.130288, X2 dengan X3 sebesar 0.751911, X2 dengan X4 sebesar 0.380302, dan X2 dengan X5 sebesar -0.150206, korelasi X3 dengan X4 sebesar 0.52337, X3 dengan X5 sebesar 0.025352, dan X4 dengan X5 sebesar -0.366948. Seluruh nilai korelasi tersebut juga berada di bawah 0,80. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen X1, X2, X3, X4, dan X5 terbebas dari gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Penilaian terhadap heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi variasi dalam dispersi kesalahan di antara seluruh kumpulan titik data. Uji Glejser digunakan untuk analisis ini. Nilai probabilitas yang dihasilkan (Prob. Chi-Square) melebihi ambang batas signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa model dianggap tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

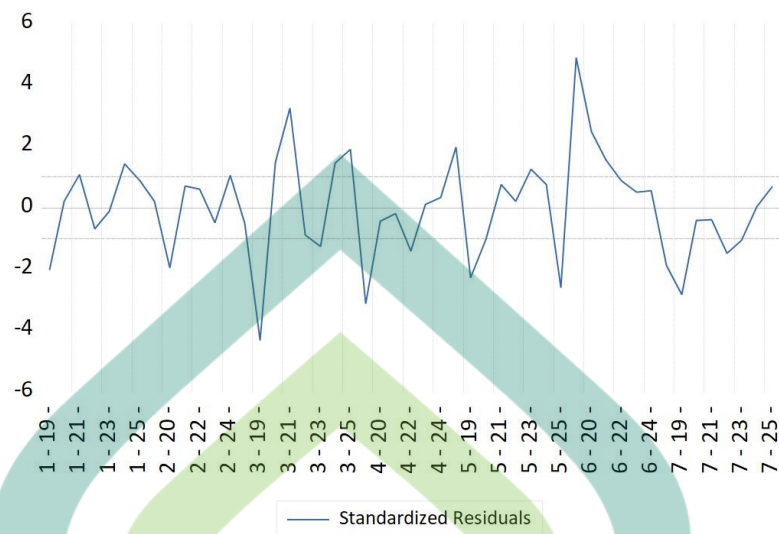
Tabel 4. 15 Hasil Uji heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS_RES
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/21/26 Time: 23:18
 Sample: 2019 2025
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 49

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN_X1	0.002476	0.027946	0.088597	0.9299
LN_X2	-0.134654	0.123195	-1.093013	0.2815
LN_X3	0.031378	0.073941	0.424367	0.6738
LN_X4	0.216062	0.376765	0.573465	0.5698
LN_X5	0.003751	0.007124	0.526498	0.6017
C	-0.857849	0.950926	-0.902120	0.3728

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai probabilitas X1 sebesar 0,9299, X2 sebesar 0,2815, X3 sebesar 0,6738, X4 sebesar 0,5698, dan X5 sebesar 0,6017. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05. sehingga masing-masing variabel tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah heteroskedastisitas :



Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Grafik residual yang disajikan menunjukkan bahwa (warna biru) tidak melampaui batas yang ditentukan (-500 sampai 500). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdeteksi adanya gejala heteroskedastisitas pada model penelitian ini (Napitupulu et al., 2021).

4. Analisis Regresi Data Panel

Persamaan regresi linier data panel yang diperoleh dari uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier adalah menggunakan model *Fixed effect model* (FEM). Hasil analisis regresi data panel disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.95322	1.899427	5.766591	0.0000
LN_X1	0.220016	0.055821	3.941474	0.0003
LN_X2	-0.103063	0.246076	-0.418826	0.6778
LN_X3	-0.023016	0.147693	-0.155834	0.8770
LN_X4	-2.056092	0.752569	-2.732098	0.0096
LN_X5	0.020278	0.014229	1.425099	0.1625

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi data panel dapat disusun dengan rumus sebagai berikut:

$$Y_{\{it\}} = 10.95322 + 0.220216X_{\{1,it\}} - 0.103063X_{\{2,it\}} - 0.023016X_{\{3,it\}} - 2.056092X_{\{4,it\}} + 0.020278X_{\{5,it\}} + \varepsilon_{\{it\}}$$

Berdasarkan data tersebut, maka hasil interpretasinya:

- Dengan nilai konstanta sebesar 10.95322, dapat diartikan bahwa jika tingkat pengangguran terbuka (X1), tingkat partisipasi angkatan kerja (X2), upah minimum (X3), indeks pembangunan manusia (X4), dan penyaluran dana zakat (X5) tidak mengalami perubahan atau bernilai 0, maka tingkat kemiskinan (Y) akan berada pada angka 10.95322.
- Koefisien beta yang terkait dengan variabel tingkat pengangguran terbuka (X1) adalah 0,220216. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen lainnya tetap tidak berubah, kenaikan satu satuan pada X1 akan mengakibatkan kenaikan sebesar 0,220216% pada Y (tingkat kemiskinan).
- Koefisien beta yang terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja

(X2) ditetapkan sebesar -0.103063. Jika semua variabel lainnya tetap konstan, kenaikan sebesar satu satuan pada X2 diproyeksikan akan menghasilkan penurunan sebesar 0.103063% persen pada Y.

- d. Koefisien beta yang terkait dengan variabel upah minimum (X3) dihitung sebesar -0.023016. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan, kenaikan sebesar satu satuan (dalam Rupiah) pada X3 dikaitkan dengan penurunan sebesar 0.023016% pada Y.
- e. Koefisien beta yang terkait dengan variabel indeks pembangunan manusia (X4) adalah -2.056092. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen lainnya tetap tidak berubah, kenaikan satu satuan pada X4 akan mengakibatkan penurunan sebesar 2.056092% pada Y.
- f. Koefisien beta yang terkait dengan variabel penyaluran dana zakat (X5) dihitung sebesar 0.020278. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan, kenaikan satu satuan (dalam Rupiah) pada X5 dikaitkan dengan kenaikan sebesar 0.020278% pada Y.

5. Uji Signifikasi

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan dalam mencari dampak masing-masing dari variabel independ terhadap variabel depend secara sendiri. Pada penelitian ini jumlah observasi (n) yaitu 49 serta jumlah variabel

bebas dan terikat (k) yaitu 6, maka nilai derajat kebebasannya yaitu 43. Sehingga, T tabel diketahui yaitu 2.0167. Jika nilai t tabel $< t$ hitung dan nilai probabilitas $< 0,05$ (nilai α), artinya variabel-variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat secara parsial.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.95322	1.899427	5.766591	0.0000
LN_X1	0.220016	0.055821	3.941474	0.0003
LN_X2	-0.103063	0.246076	-0.418826	0.6778
LN_X3	-0.023016	0.147693	-0.155834	0.8770
LN_X4	-2.056092	0.752569	-2.732098	0.0096
LN_X5	0.020278	0.014229	1.425099	0.1625

Sumber: Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan tabel diatas, hasil interpretasinya menyatakan bahwa:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)

Pada uji t didapatkan variabel upah minimum mempunyai t hitung sebesar 3.941474 dengan t tabel pada α 5% sebesar 2.0167. Sehingga t hitung $> t$ table. Sedangkan nilai probabilitas $0.0003 < 0,05$ berarti keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima maka tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X2)

Analisis terhadap variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dengan menggunakan uji- t menghasilkan nilai t terhitung sebesar -0.418826. Nilai ini lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 2.0167, yang ditetapkan pada tingkat signifikansi 5%. nilai p

sebesar 0,6778 lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Akibatnya, hipotesis nol (H_0) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.

3) Upah Minimum (X_3)

Dalam analisis uji-t, upah minimum menunjukkan nilai hitung sebesar -0.155834. Nilai t tabel yang ditetapkan untuk ambang signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah 2.0167. Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel. Selain itu, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,8770, yang lebih besar daripada ambang batas 0,05. Hasil ini mendukung penerimaan hipotesis nol (H_0) dan penolakan hipotesis alternatif (H_a). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa upah minimum tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.

4) Indeks Pembangunan Manusia (X_4)

Analisis terhadap variabel indeks pembangunan manusia dengan menggunakan uji-t menghasilkan nilai t terhitung sebesar -2.732098. Nilai ini lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 2.0167, yang ditetapkan pada tingkat signifikansi 5%. nilai p sebesar 0,0098 lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Akibatnya, hipotesis nol (H_0)

ditolak, sedangkan hipotesis alternatif (H_{a4}) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang negative dan signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.

5) Penyaluran Dana Zakat (X_5)

Analisis terhadap variabel penyaluran dana zakat dengan menggunakan uji-t menghasilkan nilai t terhitung sebesar 1.425099. Nilai ini lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar 2.0167, yang ditetapkan pada tingkat signifikansi 5%. nilai p sebesar 0,1625 lebih besar daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Akibatnya, hipotesis nol (H_{05}) diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H_{a5}) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap tingkat kemiskinan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Sebuah analisis bersamaan dilakukan guna memastikan terdapat pengaruh variabel bebas secara kolektif memberikan pengaruh secara statistik terhadap variabel terikat. sampel sebanyak 49 individu ($n=49$) dan mencakup 5 variabel independen serta 1 variabel dependen ($k=6$), derajat kebebasan dihitung sebesar 5 untuk df_1 dan 43 untuk df_2 . Dengan angka-angka tersebut, nilai F kritis yang terkait ditetapkan sebesar 2,4322. Hipotesis nol (H_0) tidak dianggap valid, dan hipotesis alternatif (H_1) diterima apabila nilai statistik F

yang dihitung melebihi ambang batas F yang ditetapkan, serta probabilitas F yang terkait berada di bawah tingkat α (α) yang ditetapkan sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen, secara keseluruhan, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.985154	Mean dependent var	2.270989
Adjusted R-squared	0.980740	S.D. dependent var	0.327789
S.E. of regression	0.045490	Akaike info criterion	-3.133752
Sum squared resid	0.076566	Schwarz criterion	-2.670449
Log likelihood	88.77691	Hannan-Quinn criter.	-2.957975
F-statistic	223.2066	Durbin-Watson stat	1.515239
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan tabel diatas nilai F hitung (F -statistic) yaitu sebesar 223.2066, sedangkan diketahui besarnya F tabel yaitu 2.4322, sehingga nilai F hitung $> F$ tabel. Variabel tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan penyaluran dana zakat berpengaruh secara simultan/bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan, sehingga H_{06} ditolak dan H_{a6} diterima. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai probabilitas (F -statistic) sebesar 0,000000 yang lebih kecil dibandingkan nilai α 0,05 ($0,000000 < 0,05$).

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai dilihat dari hasil Adjusted R^2 berkisar dari 0 – 1, di

mana semakin mendekati angka 1 berarti model dapat menjelaskan keterikatan antar variabel dengan lebih baik.

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.985154	Mean dependent var	2.270989
Adjusted R-squared	0.980740	S.D. dependent var	0.327789
S.E. of regression	0.045490	Akaike info criterion	-3.133752
Sum squared resid	0.076566	Schwarz criterion	-2.670449
Log likelihood	88.77691	Hannan-Quinn criter.	-2.957975
F-statistic	223.2066	Durbin-Watson stat	1.515239
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai Adjusted R-Squared yaitu 0.980740. Nilai koefisien determinasi ini menunjukkan Tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia dan penyaluran dana zakat memiliki kemampuan dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan dengan nilai 98,0740%. Sedangkan, sisa nilai yang dapat dijelaskan oleh variabel di luar penelitian menunjukkan sebesar 1,9260%.

Damodar N. Gujarati & Porter, (2009) menjelaskan bahwa dalam penelitian empiris, nilai R^2 yang sangat tinggi tetap dapat ditemukan bersamaan dengan koefisien regresi yang tidak signifikan secara statistik. Karena itu peneliti tidak seharusnya hanya berfokus pada tingginya R^2 , tetapi juga perlu memperhatikan signifikansi statistik seperti uji t, uji f, kondisi multikolinearitas dan relevansi teoritis variabel.

D. Pembahasan

Setelah dilakukan serangkaian pengujian dan analisis terhadap data penelitian, dapat diketahui hasil mengenai keterkaitan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, serta penyaluran dana zakat dengan tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Adapun hasil penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai koefisien 0.220016. Maka berarti apabila tingkat pengangguran terbuka naik sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0.220016%. Pada hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung yaitu 3.941474. Dengan besarnya nilai t tabel yaitu 2.0167, maka t hitung $>$ t tabel. Selanjutnya, pada nilai probabilitas t hitung yaitu $0.0003 < 0,05$ (nilai α), keputusannya H_0 ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya variable tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan periode 2019-2025.

Hasil ini mendukung temuan Donesia et al., (2025), dan Rivana & Gani, (2024) yang sama-sama menyimpulkan bahwa pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya Adinda Afrilia Puteri et al., (2024) justru menemukan bahwa

pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara logika, ketika anggota rumah tangga kehilangan pekerjaan, sumber penghasilan keluarga ikut terputus. Akibatnya, daya beli untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal melemah, sehingga risiko rumah tangga tersebut jatuh ke bawah garis kemiskinan meningkat.

Kondisi tersebut juga tampak pada data penelitian. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat sebesar 9,97 persen di Kabupaten Tegal pada tahun 2021, sedangkan yang terendah sebesar 4,11 persen di Kabupaten Batang pada tahun 2019. Periode 2020-2021 bertepatan dengan pandemi COVID-19 ketika aktivitas usaha tertekan, dan pada periode itu pula tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 17,43 persen tercatat di Kabupaten Brebes pada tahun 2020. Karakteristik ekonomi kawasan yang bertumpu pada industri tekstil, batik, dan sektor pengolahan padat karya membuat penyerapan tenaga kerja sangat sensitif terhadap guncangan usaha sehingga ketika lapangan kerja berkurang dampaknya cepat dirasakan pada pendapatan rumah tangga.

Hasil ini sesuai dengan teori lingkaran setan kemiskinan Nurkse yang menempatkan pengangguran menjadi simpul dalam siklus kemiskinan. Pengangguran menyebabkan pendapatan hilang, menekan kemampuan menabung dan berinvestasi, sehingga peluang kerja baru semakin terbatas dan pengangguran bertahan.

2. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui variabel tingkat partisipasi angkatan kerja mempunyai koefisien -0.103063 . Maka berarti apabila tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan turun sebesar -0.103063% . Pada hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung yaitu -0.418826 . Dengan besarnya nilai t tabel yaitu 2.0167 , maka t hitung $< t$ tabel. Selain itu, nilai probabilitas t hitung yaitu $0.6778 > 0,05$ (nilai α), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.

Temuan ini mendukung hasil studi Widyawati et al., (2025) yang menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap angka kemiskinan. Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Handani & Suhariato, (2025) yang membuktikan bahwa TPAC berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. di Sumatera Utara.

Dalam perspektif Teori Lingkaran Setan Kemiskinan, partisipasi kerja hanya mampu memutus lingkaran apabila diikuti oleh produktivitas dan pendapatan yang memadai. Pada daerah dengan modal terbatas, tenaga kerja yang melimpah cenderung terserap pada pekerjaan berproduktivitas dan berupah rendah, sehingga penduduk yang bekerja

tetap berada di sekitar atau di bawah garis kemiskinan (*working poor*). TPAK hanya mengukur berapa banyak penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari kerja, tanpa memperhitungkan kualitas pekerjaan seperti upah, jam kerja, dan status formal atau informal. Oleh karena itu, bertambahnya penduduk yang masuk ke pasar kerja belum otomatis menaikkan pendapatan rumah tangga.

Data penelitian memperlihatkan gejala tersebut TPAK Kabupaten Batang meningkat dari 68,75 persen (2019) menjadi 77,81 persen (2025), atau bertambah 9,06 poin, tetapi kemiskinan hanya turun 0,56 poin, dari 8,35 persen menjadi 7,79 persen. Di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, TPAK naik masing-masing menjadi 71,90 persen dan 71,97 persen pada 2025, namun tingkat kemiskinannya masih di atas 13 persen. Temuan ini menegaskan bahwa yang menentukan bukan sekadar jumlah penduduk yang bekerja, melainkan kualitas dan produktivitas pekerjaan tersebut.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui upah minimum mempunyai koefisien -0.023016. Maka berarti apabila upah minimum naik sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan naik sebesar -0.023016%. Pada hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung yaitu -0.155834. Dengan besarnya nilai t tabel yaitu 2.0167, maka t hitung $< t$ tabel. Selanjutnya, pada nilai probabilitas t hitung yaitu $0.8770 > 0,05$

(nilai α), keputusannya H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Variabel upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kemiskinan. Temuan tersebut mendukung studi Utami & Rofiuddin, (2022) dan Ndamayilu et al., (2024) yang juga menyimpulkan bahwa upah minimum bukan faktor yang memengaruhi kemiskinan.

Menurut Febrianti & Utami, (2024) terbatasnya efektivitas upah minimum dalam menekan kemiskinan pekerja disebabkan oleh cakupannya yang hanya meliputi sektor terdaftar dan teregulasi, sedangkan kelompok pekerja miskin umumnya terkonsentrasi pada kegiatan usaha yang tidak terikat regulasi. Data penelitian menunjukkan rata-rata upah minimum sebesar Rp2.086.960, dengan nilai terendah Rp1.665.850 di Kabupaten Brebes tahun 2019 dan tertinggi Rp2.545.138 di Kota Pekalongan tahun 2025. Kenaikan upah minimum dari tahun ke tahun tidak diikuti penurunan kemiskinan yang berarti. Selain itu, kawasan yang didominasi usaha padat karya dan usaha kecil menengahkan sangat sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja, sehingga kenaikan upah yang melampaui kemampuan usaha dapat menekan margin keuntungan dan menghambat penyerapan tenaga kerja baru.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Upah Normal

(Natural Wage) yang dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1817, sebagaimana dikutip dalam Nurcahyaningtyas, (2009). Teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat upah yang wajar berkaitan dengan biaya yang diperlukan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga, serta mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar tenaga kerja. Kebutuhan hidup tersebut mencakup kebutuhan dasar, seperti kesehatan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Sementara itu, kemampuan perusahaan dalam memberikan upah dipengaruhi oleh kapasitas produksi dan hasil penjualan. Demikian tingkat upah tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan hidup pekerja, tetapi juga berkaitan dengan kondisi usaha dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan produksinya.

Teori Upah Normal memberikan pemahaman bahwa kenaikan upah minimum belum tentu secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun upah minimum ditetapkan untuk melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak, efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan bergantung pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan upah serta cakupan pekerja yang menerima upah tersebut. Pekerja yang berada di sektor informal atau memiliki pendapatan tidak tetap belum tentu memperoleh manfaat langsung dari kenaikan upah minimum. Selain itu apabila peningkatan upah tidak disertai dengan peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja, manfaat kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat dapat menjadi terbatas. Oleh

sebab itu tidak signifikannya pengaruh upah minimum dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan upah minimum belum mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara statistik di Eks Karesidenan Pekalongan selama periode 2019–2025.

Penurunan tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan upah minimum, tetapi juga didukung oleh penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang layak dan berkelanjutan, sehingga peningkatan kesejahteraan dapat menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara lebih merata.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui variabel indeks pembangunan manusia mempunyai koefisien -2.056092. Maka berarti apabila indeks Pembangunan manusia naik sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan turun sebesar -2.056092%. Pada hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung yaitu -2.732098. Dengan besarnya nilai t tabel yaitu 2.0167, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$. Selain itu, nilai probabilitas t hitung yaitu $0.0096 < 0,05$ (nilai α), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.

Pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap kemiskinan dalam penelitian ini konsisten dengan temuan (Alvia et al., 2024) dan (Simamora et al., 2025) (Sukron & Yasin, 2021). Di sisi lain Sipahutar & Adanan Murroh Nasution, (2023) menghasilkan kesimpulan yang berlawanan, karena menurut mereka IPM tidak berdampak pada jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara.

IPM mencakup dimensi pelayanan medis, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat peningkatan ketiga dimensi tersebut memperbaiki kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas, daya saing, dan peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik ikut meningkat dan pada akhirnya menurunkan kemiskinan. Pola ini terlihat jelas pada data penelitian. Kota Pekalongan mencatat IPM tertinggi sebesar 77,95 pada tahun 2025 dan pada tahun yang sama memiliki tingkat kemiskinan terendah sebesar 6,14 persen. Sebaliknya, Kabupaten Brebes mencatat IPM terendah sebesar 66,11 pada tahun 2020, bersamaan dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 17,43 persen. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dari Nurkse (1953). Rendahnya IPM menandakan terbatasnya peluang masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Realitas tersebut menekan produktivitas sehingga pendapatan

rendah. Pendapatan yang rendah membatasi kemampuan rumah tangga untuk berinvestasi pada kesehatan maupun pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia tetap rendah dan IPM sulit meningkat. Akibatnya masyarakat tetap berada dalam kemiskinan

5. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, diketahui penyaluran dana zakat mempunyai koefisien 0.020278. Maka berarti apabila penyaluran dana zakat naik sebesar satu satuan, maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0.020278%. Pada hasil uji parsial menunjukkan nilai t hitung yaitu 1.425099. Dengan besarnya nilai t tabel yaitu 2.0167, maka $t_{hitung} < t_{tabel}$. Selanjutnya, pada nilai probabilitas t hitung yaitu 0.1625 $> 0,05$ (nilai α), keputusannya H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel penyaluran dana zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019-2025.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Putra & Rahmi, 2026) dan (Octavia et al., 2026) yang memperlihatkan penyaluran dana zakat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat dijelaskan melalui Teori Ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Umar Chapra, sebagaimana dikutip dalam Saprida et al., (2021). Teori tersebut memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material,

tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia melalui pengalokasian dan pendistribusian sumber daya sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Dalam perspektif ini distribusi kekayaan yang adil merupakan salah satu aspek penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi sosial dan ekonomi karena dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.

Tidak signifikannya pengaruh penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa keberadaan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan belum tentu secara langsung menghasilkan perubahan tingkat kemiskinan yang dapat diukur secara statistik. Meskipun zakat memiliki tujuan untuk membantu mustahik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian tujuan tersebut bergantung pada efektivitas pengelolaan, ketepatan sasaran penerima, besarnya dana yang disalurkan, serta bentuk program yang dilaksanakan. Apabila dana zakat yang disalurkan belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat miskin atau pemanfaatannya belum mampu mendorong peningkatan pendapatan secara berkelanjutan, dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan secara agregat dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak berarti bahwa zakat tidak bermanfaat dalam mengatasi kemiskinan, melainkan menunjukkan bahwa pengaruh

penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan selama periode penelitian belum terbukti signifikan secara statistik.

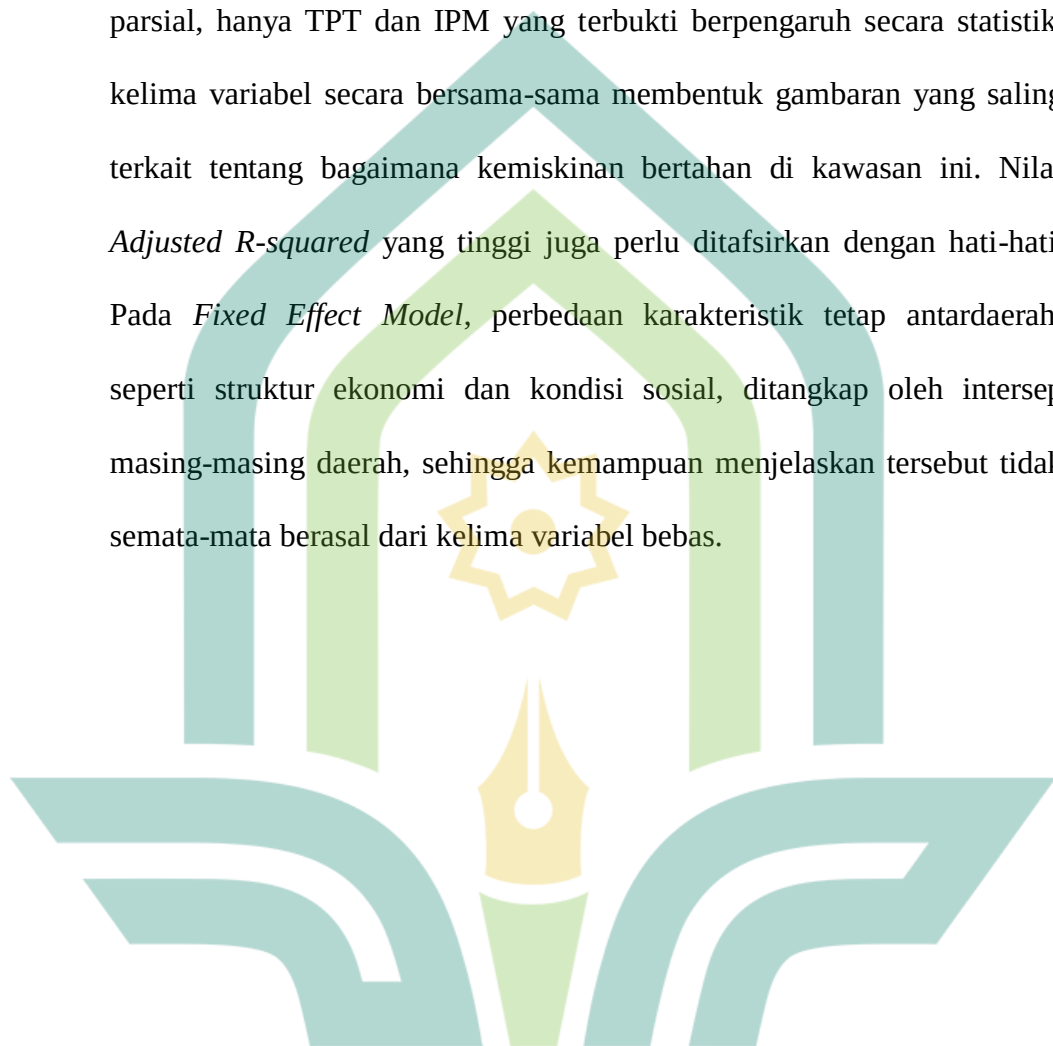
6. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, dan Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan

Pengujian simultan menghasilkan nilai F hitung sebesar 223.2066, yang mana nilai ini melampaui F tabel sebesar 2.4322 (F hitung $>$ F tabel). variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen di Eks Karesidenan Pekalongan secara signifikan selama periode 2019–2025, sehingga peneliti menolak H_{06} dan menerima H_{a6} . Kesimpulan ini didasarkan pada nilai probabilitas F -statistik sebesar 0,000000, yang berada di bawah batas signifikansi α sebesar 0,05 ($0,000000 < 0,05$).

Pada hasil uji koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai *Adjusted R-squared* yaitu 0,980740. Angka ini mengindikasikan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, minimum, indeks pembangunan manusia, dan zakat memiliki kemampuan dalam menjelaskan tingkat kemiskinan dengan nilai 98,0740%. Sedangkan, sisa nilai yang dapat dijelaskan oleh variabel di luar penelitian menunjukan sebesar 1,9260%.

Dalam kerangka teori *vicious circle of poverty* yang dikemukakan Nurkse (1953), kemiskinan dipandang sebagai hasil dari rangkaian

keterbatasan akses yang saling berkaitan dan menjadi sebab sekaligus akibat satu sama lain, bukan dari satu faktor saja. Namun, jika diuji secara parsial, hanya TPT dan IPM yang terbukti berpengaruh secara statistik. kelima variabel secara bersama-sama membentuk gambaran yang saling terkait tentang bagaimana kemiskinan bertahan di kawasan ini. Nilai *Adjusted R-squared* yang tinggi juga perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Pada *Fixed Effect Model*, perbedaan karakteristik tetap antardaerah, seperti struktur ekonomi dan kondisi sosial, ditangkap oleh intersep masing-masing daerah, sehingga kemampuan menjelaskan tersebut tidak semata-mata berasal dari kelima variabel bebas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji dampak dari tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), upah minimum, indeks pembangunan manusia (IPM), dan penyaluran dana zakat terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan untuk periode 2019–2025. Data yang dipergunakan adalah data panel yang terdiri dari 49 observasi (meliputi tujuh kabupaten/kota selama tujuh tahun) yang dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews 13. Seluruh variabel ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural ($\ln$) sehingga model berbentuk log-log dan koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, model yang paling sesuai adalah Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan analisis dan pembahasan pada Bab IV, kesimpulan berikut dapat ditarik:

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019–2025. Hasil ini menunjukkan bahwa hilangnya kesempatan kerja langsung menekan pendapatan rumah tangga dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dampaknya terasa lebih kuat di kawasan yang bertumpu pada industri padat karya, karena sektor tersebut peka terhadap guncangan usaha, seperti pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020–2021.

2. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Bertambahnya penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja belum tentu menurunkan kemiskinan, sebab TPAK hanya mengukur banyaknya penduduk yang bekerja atau mencari kerja, bukan kualitas pekerjaannya. Penduduk yang bekerja tetap dapat berada di sekitar garis kemiskinan apabila pekerjaan yang tersedia berproduktivitas dan berupah rendah (*working poor*).
3. Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja sektor formal, sedangkan banyak pekerja miskin berada di sektor informal yang tidak terjangkau kebijakan ini. Data penelitian menunjukkan upah minimum di seluruh daerah naik setiap tahun, dengan nilai tertinggi Rp2.545.138 di Kota Pekalongan pada tahun 2025, tetapi kenaikan tersebut tidak diikuti perubahan tingkat kemiskinan yang berarti secara statistik.
4. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan asumsi variabel lain konstan, kenaikan IPM sebesar satu poin diikuti penurunan tingkat kemiskinan sekitar 0,4018 poin persentase. Di antara kelima variabel, IPM memiliki tingkat signifikansi yang paling kuat. Pola ini tampak pada data, yaitu Kota Pekalongan mencatat IPM tertinggi (77,95 pada tahun 2025) sekaligus tingkat kemiskinan terendah (6,14 persen), sedangkan Kabupaten Brebes mencatat IPM terendah (66,11 pada tahun 2020) bersamaan dengan tingkat kemiskinan tertinggi (17,43 persen).

Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak terbukti mendorong produktivitas serta pendapatan penduduk sehingga kemiskinan berkurang.

5. Penyaluran dana zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Pertama zakat yang tercatat hanya dana yang dihimpun dan disalurkan melalui lembaga resmi, sementara zakat yang diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik tidak terdata. Kedua, nominalnya masih relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk miskin (rata-rata Rp2,92 miliar per daerah per tahun). Ketiga, penyaluran yang bersifat konsumtif hanya membantu kebutuhan jangka pendek, sedangkan dampak zakat produktif baru terlihat dalam jangka lebih panjang.
6. Secara simultan, tingkat pengangguran terbuka, TPAK, upah minimum, IPM, dan zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan tahun 2019–2025. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelima variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran terbuka, TPAK, upah minimum, IPM, dan zakat secara simultan berkaitan dengan perubahan tingkat kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan selama periode penelitian. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor secara parsial, tetapi dapat dipahami melalui

keterkaitan berbagai faktor ketenagakerjaan, ekonomi, pembangunan manusia, dan instrumen ekonomi Islam secara bersama-sama.

B. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang masih melekat pada penelitian ini dan perlu peneliti selanjutnya cermati, yaitu:

1. Cakupan penelitian terbatas pada satu kawasan (2 kota dan lima kabupaten di Eks Karesidenan Pekalongan) dengan periode pengamatan tujuh tahun (2019–2025), sehingga jumlah observasi hanya 49. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh Provinsi Jawa Tengah maupun tingkat nasional. Periode pengamatan juga mencakup masa pandemi COVID-19 yang menimbulkan guncangan pada data pengangguran dan kemiskinan.
2. Penelitian hanya menggunakan lima variabel bebas, yaitu TPT, TPAK, upah minimum, IPM, dan zakat. Faktor lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi (PDRB), inflasi, tingkat pendidikan, investasi, dan belanja sosial pemerintah, belum dimasukkan ke dalam model.
3. Data penyaluran dana zakat hanya mencakup dana yang tercatat pada lembaga resmi pengelola zakat. Zakat yang disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik tidak terdata, dan data yang digunakan belum membedakan penyaluran konsumtif dari penyaluran produktif. Kondisi ini dapat menyebabkan pengaruh zakat terhadap kemiskinan tidak terukur secara utuh.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan, saran menjadi perihal penting yang diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengurangan pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan pelatihan vokasional yang sesuai kebutuhan industri setempat, seperti tekstil, batik, dan pengolahan. Prioritas diberikan pada daerah yang masih memiliki TPT tinggi, yaitu Kabupaten Brebes (8,07 persen pada tahun 2025), Kabupaten Tegal (7,61 persen), dan Kabupaten Pemalang (6,61 persen).
- b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan IPM secara merata melalui perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang yang tingkat kemiskinannya tertinggi di kawasan ini. IPM merupakan variabel dengan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan sehingga layak menjadi sasaran utama kebijakan.

2. Bagi BAZNAS dan Lembaga Pengelola Zakat

- a. Lembaga pengelola zakat diharapkan memperkuat penyaluran zakat produktif sehingga zakat berdampak pada peningkatan pendapatan secara berkelanjutan dan bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek.
- b. Lembaga pengelola zakat perlu meningkatkan ketepatan sasaran melalui pendataan mustahik yang akurat dan terintegrasi dengan data

kemiskinan daerah, memperbaiki pencatatan serta pelaporan penghimpunan dan penyaluran zakat, dan bersinergi dengan program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah. Upaya ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

3. Bagi Riset Mendatang

Diharapkan riset dimasa depan dapat mengembangkan dan memperpanjang periode pengamatan agar hasil lebih dapat digeneralisasikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Afrilia Puteri, Wildatussilmiah, O., Yunani, Harning, R. D., & Dermawan, D. (2024). Pengaruh Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Tahun 2015-2023 Adinda. *INFORMATIKA*, 12(2), 222–229.
- Afriansyah, A., Putriana, M., & Nofriza, E. (2026). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2020-. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(November 2025), 688–704. <file:///C:/Users/user/Downloads/688-704+5479+Jurnal+Ayub+Afriansyah+Sinta5.pdf>
- Alvia, D. O., Efendi, I. W., Malihah, K. P., & Kurniawan, M. (2024). Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2014-2023 Terhadap Pertumbuhan Ekomomi Di Provinsi Banten. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(6).
- Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 10(2), 158–169. <https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02>
- Anwar, M., & Nursan, M. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel Dengan Aplikasi Eviews* (F. Hijriyanti, Ed.). Pustaka Bangsa.
- Ariesti, A. E., & Asmara, K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 432–438.
- Awaludin, M., Maryam, S., & Firmansyah, M. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Kecil Dan Menengah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 156–174.
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendr. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia(Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5, 117–125.
- Azizah, L. N., Pasaribu, J. R. S., Hutagalung, I., Purba, A. A., & Sinaga, S. A. (2024). Analisis Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(1), 25–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11641452>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen 2020* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, Ed.). <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=2f3rTcWtuLQligEBKyfpD2ViVFp3aGJEQjBBNmJDC3BhWHFKRnN0MjBLUCszWHdvKysvdHZxaGFXUmRqdnhrUXBPaEk5c2JjbElha0UvMjRtOVNvVHVlCW15bVN4NGtCVlhXd0VmZGg2VnUyTCtWbW9uZ2hNRFEvZTN5VHMzMULCVlpySHVES3pXRkpNLzlMM2FmanZrM3lqZjJGcVFvOG1UYitXc1NxWkNnRW5YTkxsK005cXFMaGk4aTdSeklpc1NlNjNBZ3dvK1hib1prTGprMVcrU2FuZlFldzV0VnZVdm>

- VpNTZ6TUZCSk5kVG5CekVZUmszRVEwaHVAY0J6WnRxNVBtRW1W
a0dlbXRXWFZid0kyL0VncTFkQ2RjNVQ4d0FTUUJnPT0=
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022* (N. Sahrizal, N. Taufiq, & Masfufah, Eds.).
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan manusia metode baru*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2024*. BPS. <https://brebeskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQjMg==/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/kemiskinan.html>
- Basuki, A. T. R. I. (2014). *Regresi Model PAM, ECM Dan Data Panel Dengan Eviews 7* (pertama). Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , dan Ketentuan Lengkap. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.
- Damanik, M. R., Manik, R. L., & Khadafi, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan. *JHIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, Vol : 2(No: 7), 13479–13496.
- Damodar N. Gujarati, & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition* (A. E. Hilbert & N. Fox, Eds.; Fifth edit). Douglas Reiner.
- Donesia, D., Abdurrahman, Idzuka, V., Okarina, S., Sadiq, M., Rizkidiyanto, T., & Putra, A. R. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan : Studi Ekonomi Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(3), 1–11.
- Dwi Puspa, K. I. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2004-2014. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- F Fauzi. (2017). K-Nearset Neighbor (K-NN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah F. *Jurnal MIPA*, 40(2), 118–124.
- Febrayanto, C. R., Hanfan, A., Nurjono, D., Nugroho, A., No, P., & Tengah, J. (2025). Identifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kesiapan Tenaga Kerja Jenjang Pendidikan Menengah. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 5(3). <https://doi.org/10.17977/um065.v5.i3.2025.6>
- Febrianti, E., & Utami, H. W. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Penduduk Miskin Di Jawa Timur Periode Tahun 2020-2024. *JURNAL Edueco Universitas Balikpapan*, 8(2), 551–560.
- Fitria, D., & Novita, D. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Journal Transformation of Mandalika*, 5(12), 432–439.
- Fitria, D., Novita, D., Hanum, N., & Andiny, P. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pendidikan Terhadap

- Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Journal Transformation of Mandalika*, 5(9), 666–673.
- Ghozali, I., & Dwi Ratmono. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Eviews 10* (A. Tejokusumo, Ed.; Cetakan II). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., & Hidayatullah, R. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran : Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), Hal. 256–270.
- Handani, T., & Suhariato, J. (2025). Pengaruh TPT, PDRB, dan TPAK Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2023. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 22–39.
- Hapsari Wiji Utamia, & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2013. *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 4(01), 11–20. <https://doi.org/10.30957/ekosiana.v4i01.41>
- Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). *FARABI Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(c), 217–226.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *ESA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 110–134.
- Ita Pingkan Fasnje Rorong. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(4), 398–415.
- Josua Ferdinand, Ardiana, O. D., Azzahra, D., Putri, M. S., & Satino. (2024). Analisis Ketidakesesuaian Upah Buruh Dengan Perbandingan Upah Minimum Regional. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 56–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11521043>
- Kurniawan, M. R. D., Salam, A., Utami, A. F., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Pendidikan Terhadap Persentase Kemiskinan Dalam Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Timur 2017-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(19), 640–651.
- Kusumaningtyas, E. S., Subagyo, E., Adinugroho, W. C., Jacob, J., Berry, Y., Nuraini, A., Sudjono, & Syah, S. (2022). *Konsep Dan Praktik Ekonometrika Menggunakan Eviews* (Miftakus Surur, Ed.; Miftakus S). Academia Publication.
- Madaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 3(2), 269–273.
- Madany, N., & Rais, Z. (2022). Regresi Data Panel dan Aplikasinya dalam Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Idx Lq45 Bursa Efek Indonesia. *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, 4(2), 79–94. <https://doi.org/10.35580/variansiunm28>
- Mankiw, N. G. (2006). *Principles Of Economics Pengantar Ekonomi Mikro Edisi*

- 3 (R. Widyaningrum, Ed.; ketiga). Salemba Empat.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Peter Wilson. (2012). *Pengantar Ekonomi Makro Principles of economics an asian edition volume 2* (Dedy A Halim, Ed.; volume 2). Penerbit Salemba.
- Martaliah, N., Anita, E., Rahman, F., & Ramli, L. N. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2010-2021. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(2), 334–344.
- Mirawati, F., & Feriyanto, N. (2023). Faktor-Faktor yang memengaruhi jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art9>
- Mufidah, D., & Azizah, A. S. (2024). Analisis Faktor Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Menggunakan Metode Analisis Faktor. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2(5), 01–10. <https://ifrelresearch.org/index.php/jmk-widyakarya/article/view/4162/4371>
- Muh. Saleh Mire. (2019). *Ekonometrika (Suatu Pendekatan Kuantitatif)* (M. S. Mire, Ed.; Pertama). Tahta Media Grup. <https://www.scribd.com/document/471074282/Ekomometrika-pdf>
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 17–40.
- Musnaeni, & Khasanah, A. M. (2025). Distribusi Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Praktik Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(April), 89–100.
- Muttaqin, M., & Anwar, K. (2023). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 83–95. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i1.266>
- Nani. (2022). *Step By Step Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews* (E. G. Ahmad & A. Nurcahyani, Eds.; Terbitan P). isi Intelegensia.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnik Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-EVIEWS* (edisi 1). Madenatera.
- Nazwa Naisniatunnisa Sholihah, & Mirna Nur Alia Abdullah. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Aktif Di Indonesia. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(2), 131–138. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3344>
- Ndamayilu, W. H., Hudang, A. K., & Rewa, K. A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JIGE: Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1078–1091.
- Nizhamul, D. L., Istighfarah, V., & Damayanti, N. D. (2023). Faktor-Faktor Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Hongkong Dan Singapura. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(2), 99–106.

- Nurchahyaningtyas. (2009). *Ekonomi Untuk Kelas X SMA/MA* (Karmila & Westriningsih, Eds.). Cempaka Putih.
- Octavia, S. A., Nasir, M., & Alfianti, J. (2026). Pengaruh Realisasi Dana Zakat dan Dana Infak terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 03(02), 1729–1743.
- Oktaviani, R., & Tanti Novianti. (2022). *Teori Makroekonomi 1* (M. C. Kurniawan, Ed.). IPB Press.
- Pratiwi, A. E., Wulandari, D., Hutabarat, E. T., & Silaban, S. T. (2024). Tinjauan Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(12), 550–553.
- Pratiwi, M. J., & Harsono, D. (2023). Persepsi Masyarakat Mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of Public Policy And Administration Research*, 01(02). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar>
- Putra, F. S., & Rahmi, D. (2026). Pengaruh Zakat, Indeks Pembangunan Manusia, dan Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 6(02), 327–334.
- Putri, A. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Fakta Dibalik Rendahnya Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Perspektif*, 22(1), 42–50. <https://doi.org/10.31294/jp.v22i1.21210>
- Putri, N., Irfan, M., & Artikel, I. (2023). Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan Pengaruh Bantuan Sosial dan Zakat terhadap Kemiskinan di Sumatera Barat. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(November), 110–117.
- Putri, Y. D., Kartika, R., & Aprayuda, R. (2020). Apakah Dana Zakat Dapat Mengurangi Tingkat Kemiskinan?: Studi Kasus Provinsi Sumatra Barat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(November), 248–261.
- Qomarina, N. N., Azira, N., Natal, R., Tarihoran, R., & Panggabean, V. E. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia (Periode 2004-2023). *Department of Digital BusinessJ Ournal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2822–2834. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3923/2749>
- Rahmi, M. (2021). Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 196–213.
- Raihan Al Kuwaity Putra Muttaqin, B. A. (2022). Efektivitas penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (zis) baznas kabupaten jemmer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(September 2026), 223–236.
- Rasji, R., & Susanto, C. A. (2023). Proses Penentuan Upah dan Perlindungan Hukum Hak Pekerja di Indonesia. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(2), 109–113. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1177>
- Rivana, M., & Gani, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia serta Upah Minimum terhadap Kemiskinan. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 20(1), 51–60.
- Rohima, S., & Budiyanto, M. N. (2024). *Fenomena Kemiskinan Perkotaan*;

- Miskin Abu-Abu. Unsri Press.
- Saprida, Barkah, Q., & Umari, Z. F. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (L. Novita & Miya, Eds.; Pertama). KENCANA. <https://repository.radenfatah.ac.id/23994/1/BUKU> - SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.pdf
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 10(2), 121–130. <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>
- Satria Yuda Anggriawan. (2021). Pengaruh Upah Minumum dan Distribusi Pendapatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 61–70.
- Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di provinsi banten. *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, 6(2), 236–255.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- Shafarani, Y., Djatnika, D., Mauluddi, H. A., & Laksana, B. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2014-2022. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(1), 158–172.
- Silvie, F. D., & Hasmarini, M. I. (2023). Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten, IPM, PDRB dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 374–382. <https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/355%0Ahttps://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/download/355/211>
- Simamora, T. L., Purba, R. W., Erlisa, Lita, & Riana, O. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2019-2024. *ECo-Buss: Economics and Business*, 8(2). <https://doi.org/10.32877/eb.v8i2.3507>
- Sinaga, A., Mario, C., & Septianingtiyas, I. A. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Menggunakan Regresi Linier Berganda. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(June), 568–582.
- Sipahutar, S. R., & Adanan Murroh Nasution. (2023). Pengaruh Ipm, Pdrb Per Kapita, Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 644–660.
- Sudaryana, B., & H. R. Ricky Agusiady. (2022). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Amira Dzatin Nabila, Ed.; Pertama). Deepublish Publisher.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukron, I., & Yasin, A. (2021). Pengaruh Ipm, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *INDEPENDENT : Journal Of Economics*, 1(3), 47–65.
- Sumbodo, Y. P., Marzuki, Yudhantara, S. M., & Widiastuti, S. (2024). *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan*

- Campuran* (Melvin Mirsal, Ed.; Cetakan I). PT Media Penerbit Indonesia.
- Telisa Aulia Falianty. (2019). *Teori Ekonomi Makro* (Octiviena, Ed.; 1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Tervia, S., Rositawati, A. F. D., & Halumma Zulfia Fitri. (2020). Pemodelan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tpt Provinsi Tertinggi Di Indonesia Sebagai Dampak Dari Covid-19. *Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 14(2), 17–30. file:///C:/Users/user/Downloads/2+316.pdf
- Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(01), 33–46.
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 11–20.
- Utami, I. T., & Rofiuddin, M. (2022). Analisis pengaruh upah minimum , belanja pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan pada provinsi mayoritas muslim. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2(3), 145–160.
- Wahyuni, L., Wati, N. K., Firnanda, M., & Ardiansyah, N. (2025). Pengaruh TPAK , Angka Melek Huruf , Rata Lama Sekolah , dan Beban Tanggungan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia (2018-2023). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(September), 716–727.
- Widyawati, R. F., Pratama, F. S., Talakua, J. F. D., & Nainggolan, E. (2025a). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan. *RISTEK : Jurnal Riset , Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 10(1), 57–71.
- Widyawati, R. F., Pratama, F. S., Talakua, J. F. D., & Nainggolan, E. (2025b). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 10(1), 57–71.
- Wiradyatmika, A. A. G. A., & Sudiana, I. K. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(7), 346.
- Yollit Permata Sari. (2021). *Teori Makroekonomi* (Indi Vidyasari, Ed.; cetakan 1). PT Raja Grafindo Persada. <https://rajagrafindo.co.id>
- Yono, A. A. (2021). Upah Perspektif Islam dalam Pengembangan Ekonomi. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 121–137.
- Yulistiyono, A. (2021). *Bonus Demografi Sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi* (B. P. N. Malau, Ed.). Insania. <https://insaniapublishing.com>
- Zahra, B. S., Mevia, R. D. A., Sona, R. A., & Rohmi, M. L. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Lampung Pada Priode 2012-2023. *JBEP : Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 01–15.

Zannah, L., Maylinda, M., Rafi, M., & Ridwan, M. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *JMPAI: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rifansyah Bayu Pratama
NIM : 40122156
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
E-mail address : rifansyah.bayu.pratama@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 081225396022

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

**PENGARUH TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, TINGKAT PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA, UPAH MINIMUM, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA,
DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI EKS
KARESIDENAN PEKALONGAN TAHUN 2019-2025**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2026



Rifansyah Bayu Pratama

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD